

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAPENDA
KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI



ARFANUDDIN

105731106720

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAPENDA
KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ARFANUDDIN

105731106720

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah engkau bilang tidak mungkin, sebelum engkau mati mencobanya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan doa terbaiknya serta segala pengorbanannya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi ini. Kalian sangat berarti bagi saya.

PESAN DAN KESAN

Saya sangat bersyukur bertemu dengan dosen pembimbing yang sangat baik, dan ramah. Berkat bimbingan nya, saya belajar banyak hal selama mengerjakan skripsi ini.

Pesan saya khusus donatur-donatur kampus seperti saya ini, yuk semangat tinggal skripsi doang, saya aja bisa wisuda masa kalian ngak.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda
Kabupaten sinjai
Nama Mahasiswa : Arfanuddin
No.Stambuk/NIM : 105731106720
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Univesitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Masrullah, SE.,M.Ak
NIDN: 0923089201

Khadijah Darwin, SE.,M.Ak,Ak
NIDN: 0909099202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

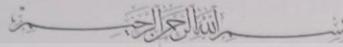
Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

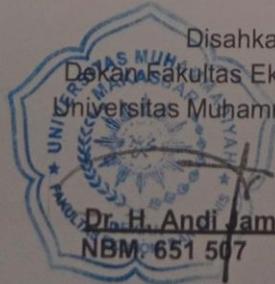
Skripsi atas Nama: NUR HASRIANTI NATSIR, Nim:105731117520 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0008/SK-Y/62201/091004/2024M, Tanggal 26 Safar 1446H/ 31 Agustus 2024M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Safar 1446 H
31 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Amir, SE., M.Si, Ak. CA (.....)
 2. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.,CA (.....)
 3. Mira, S.E., M.Ak.Ak (.....)
 4. Masrullah, SE.,M.Ak (.....)

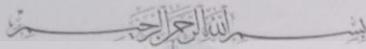
Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



FAKULTASEKONOMIDANBISNIS
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR
Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfanuddin
Stambuk : 105731106720
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

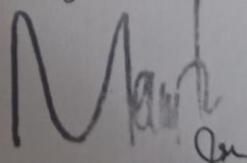

METERAI
TEMPEL
F503BALX259097915
ARFANUDDIN
NIM: 105731106720

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfanuddin
NIM : 105731106720
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

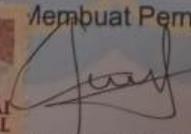
**Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Di Bapenda Kabupaten Sinjai**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 31 Agustus 2024

Membuat Pernyataan,


ARFANUDDIN
NIM:105731106720



ABSTRAK

ARFANUDDIN, 2024. Pengaruh pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di bapenda kabupaten sinjai . Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dibimbing oleh : Masrullah dan Khadijah Darwin

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, kecuali areal yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah yang dihasilkan dari badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Potensi pajak bumi dan bangunan sangat potensial. Tetap saja pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Peralatan yang bertanggung jawab untuk pemrosesan perlu ditingkatkan, seperti pengumpulan objek pajak dan subjek pajak dengan turun. Mengarahkan dan meninjau di lapangan agar diterima dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih efektif sehingga kehidupan masyarakat dapat terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Gunakan sumber data sekunder. Hipotesis ditentukan dengan menggunakan uji satu pihak (satu sisi). Yang analitis Teknik yang digunakan adalah korelasi product moment, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai Pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat korelasi sebesar 0,997. Sedangkan koefisien determinasi (r^2) = 0,944 atau 99,4% dengan nilai sig 0,000 < 0,05. Artinya nilai thitung lebih besar dari ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Asli Daerah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai”.

Kata Kunci – Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ARFANUDDIN, 2024. The influence of land and building tax (PBB) on local revenue (PAD) in the Sinjai district bapenda. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.

Supervised by: Masrullah and Khadijah Darwin

Land and Building Tax is a tax on land and/or buildings owned, controlled and/or utilized by individuals or business entities, except for areas used for plantation, forestry and mining business activities. Regional income is income obtained from the regional tax sector, regional levies generated from regionally owned business entities, the results of separate management of regional assets, and other legitimate regional income. The potential for land and building taxes is very potential. Still, its use is not optimal due to the lack of public awareness in paying taxes. The equipment responsible for processing needs to be upgraded, such as the collection of tax objects and tax subjects by going down. Directing and reviewing in the field so that Land and Building Tax revenue is accepted and received more effectively so that people's lives can be guaranteed. The aim of this research is to find out the influence of Land and Building Tax on Original Regional Income in the Sinjai Regency government. This type of research is quantitative research. Use secondary data sources. The hypothesis is determined using a one-tailed test. The analytical techniques used are product moment correlation, simple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and t test. The results of the research show that land and building tax revenue to Regional Original Income (PAD) in the Sinjai Regency Government has a strong relationship with a correlation level of 0.997. Meanwhile, the coefficient of determination (r^2) = 0.944 or 99.4% with a sig value of $0.000 < 0.05$. "This means that the value of tcount is greater than ttable, so it can be concluded that the hypothesis proposed is accepted that there is a significant influence between Land and Building Tax on the Sinjai Regency Government's Original Regional Revenue."

Keywords – Land and Building Tax, Original Regional Income

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kabupaten Sinjai*".

Skripsi penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, pengorbanan, perhatian, harapan, kasih sayang dan doa yang tulus hingga akhir penelitian ini. Serta segala dukungan baik materil maupun moral serta doa restu dari seluruh keluarga besar penulis atas keberhasilan menuntut ilmu. Semoga apayang telah diberikan kepada penulis menjadi penerang ibadah dan pencerahan dunia serta kehidupan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi penelitian ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Pak Masrullah, S.E., M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Khadijah Darwin, SE., M.Ak.,Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi sampai ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis pada saat mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih banyak kepada Keluarga dan semua kerabat. Saya tidak bisa menulis satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi Suport, semangat, dukungan, dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

9. Terima kasih banyak kepada Keluarga besar balanda dan jeger coffee.
Saya pribadi minta maaf tidak sempat menulis nama satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sehingga penulis dapata menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu support dan selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi saya.
11. Keluarga Besar AK20B dan PA20A yang selalu menyediakan waktu untuk belajar bersama dan begitu pula semangat dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kepada teman-teman mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya pihak kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi FiiSabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikumWr.Wb

Makassar, 23 juli 2024

Arfanuddin

DAFTAR ISI

PENGARUH.....	i
JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMA PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	6
2. Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Behavior)	6
3. Pajak	6
4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).....	7
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Hipotesis.....	47
1. Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	47

BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel	49
D. Jensi Dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Variabel Penelitian	51
G. Analisis Data	51
1. Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment dan Koefisien Determinasi	52
2. Analisis Regresi Sederhana	53
3. Uji Statistik Parametrik	54
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	55
1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah	55
2. Tujuan Bapenda	56
3. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai.....	57
4. Struktur Organisasi Bada Pendapatan Daerah (BAPENDA).....	58
B. FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI.....	59
C. Hasil Penelitian	77
1. Deskripsi Data	77
2. Uji Normalitas.....	78
3. Uji Korelasi Pearson Product Moment.....	78
4. Uji Koefisen Determinasi	79
5. Uji Regresi Sederhana	80
6. Uji Statistik Parametrik	81
D. Pembahasan.....	82
KESIMPULAN	84
a. Kesimpulan	84
b. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

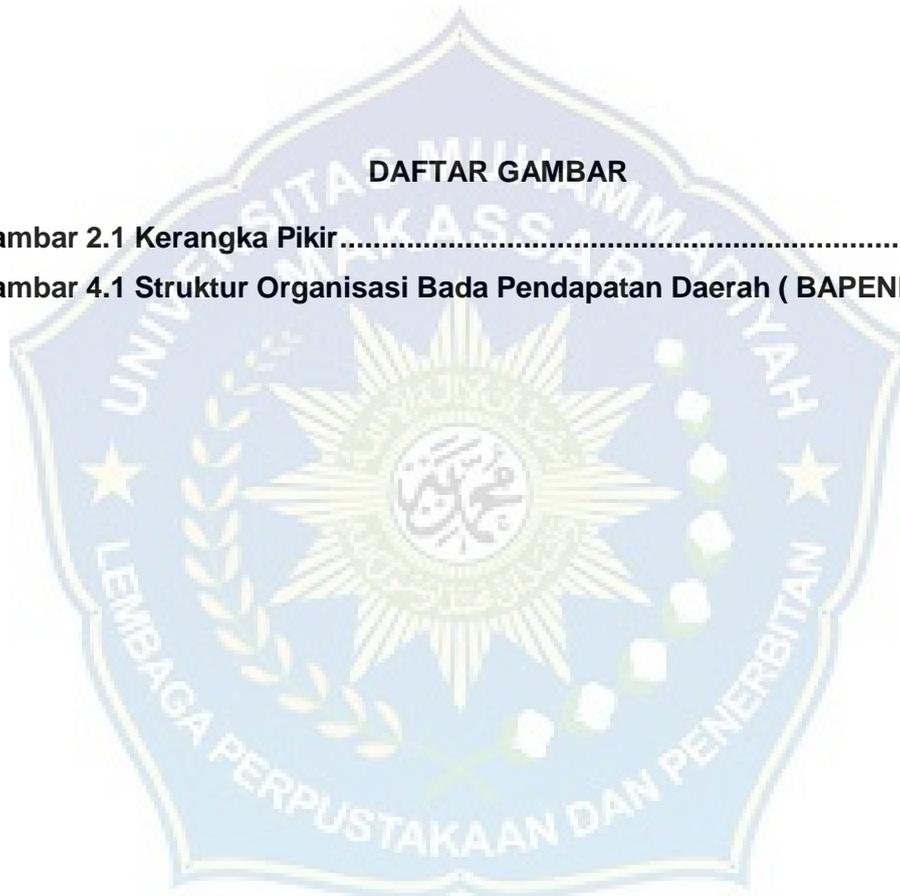
BIOGRAFI PENULIS.....	97
------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai (2019-2023)	50
Tabel 4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	77
Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	78
Tabel 4.3 Correlations.....	79
Tabel 4.4 Model Summary	79
Tabel 4.5 Coefficients(a)	80
Tabel 4.6 Coefficients(a)	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bada Pendapatan Daerah (BAPENDA)..... 58





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Daftar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sinjai 2019-2023.....	90
Lampiran 2 Deskripsi Data Penelitian.....	90
Lampiran 3 Output Hasil Penelitian Menggunakan SPSS.....	91
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	93
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang bantuan pemerintah perseorangnya lebih bergantung pada Pemerintah Provinsi sejak pelaksanaan kemerdekaan wilayah, karena Bantalan menjadi sumber atau penanda kemajuan pelaksanaan kemerdekaan wilayah. Salah satu sumber dana, yaitu Belanja Provinsi, berperan besar dalam pendanaan dan pemrumah wilayah yang kemampuannya mewujudkan kemandirian wilayah yang luas, jujur, dan penuh kesadaran. Tolak ukur untuk meningkatkan dan memperkirakan kapasitas wilayah dalam menyelesaikan pemerintahan diketahui bahwa pelaksanaan kemandirian provinsi secara hati-hati dan benar.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah. Strategi pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis, 2018). Dengan adanya pajak ini dapat dipahami mengingat bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dari bumi dan 2 bangunan. Dalam penyelenggarannya, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah, salah satunya dengan meningkatkan efektifitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta terus mengupayakan penyertaan terhadap efektifitas. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak.

Pemungutan pajak tahun Indonesia selalu menemui kendala salah satunya adalah masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah karena lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat, dimana salah satu pendapatan daerah suatu kabupaten/kota tergantung pada besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (Esse Irham et al., 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, dan pelayanan pajak yang dilakukan kepada masyarakat. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Kepatuhan pajak menurut Siti kurnia rahayu (2010), mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Hasugian, 2018).

Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak berarti memenuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Hal ini merupakan pemenuhan yang dilakukan secara sukarela dimana kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment yang tentu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajibannya (Sista, 2019).

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dan memberikan pelayanan pajak yang baik kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah (Hidayani & Lubis, 2023; Wulandari et al., 2023). Selain itu, Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu ditingkatkan seperti pendataan ke objek pajak dan subjek pajak dengan cara turun langsung dan menilai kembali di lapangan agar penerimaan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih efektif, Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan dapat mengurangi kehidupan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian dan membangun Negara sangat potensial sehingga keberadaan PBB cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu setiap tahunnya akan terus ada penambahan jumlah bumi dan bangunan yang didirikan, yang

terdampak pada meningkatnya jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Juwita, Mulyanti, & Ainur rahmaan, 2022).

Pembangunan daerah terutama di Kabupaten Sinjai tentunya tidak terlepas dari Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang merupakan elemen kunci dalam sumber dan potensi serta pembiayaan daerah sehingga keberhasilan implementasi pembangunan sangat bergantung pada efektivitas pemungutan PBB. Dimana perkembangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten sinjai itu sendiri terus meningkat dan/atau tumbuh setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data perbandingan laporan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pendapatan asli daerah (Bapenda) kabupaten sinjai pada tahun anggaran 2021-2022.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sinjai."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Apakah pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin keilmuan di bidang perpustakaan khususnya dan seluruh disiplin keilmuan secara umum terkait pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat secara Praktis

Sebagai bahan masukan kelak agar dapat mengoptimalkan pengetahuan pajak bumi dan bangunan khususnya di kabupaten sinjai yang memang penelitian ini berfokus di pajak bumi dan bangunan di kabupaten sinjai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Hipotesis ini memahami suatu kondisi dimana seorang individu pandangan i permintaan atau keputusan yang telah ditetapkan (Wijayanti et al., 2022). Penelusuran hipotesis konsistensi dapat digunakan untuk menentukan cara hidup “Bagian Sinjai” yang berdampak pada penetapan angsuran biaya tanah dan rumah terhadap penghasilan warga pada lembaga penghasilan wilayah.

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*)

Teori perilaku pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1980. Dalam hipotesis sosial diartikan bahwa faktor utama yang memunculkan cara berperilaku individu diketahui bahwa tujuan untuk melakukan perilaku tersebut. Hipotesis sosial memahami tiga bagian yang dapat memengaruhi tujuan, yang akan berkontribusi pada perkembangan individu. Ketiga bagian tersebut diketahui bahwa mentalitas, standar emosi, dan pengendalian perilaku gergaji.

3. Pajak

pengertian pajak menurut M. Beam Sommerfeld dalam bukunya A Pengantar Pengumpulan pajak memberikan definisi, secara khusus tugas diketahui bahwa perpindahan sumber daya dan aset moneter dari wilayah rahasia ke wilayah pemerintah. Pertukaran tersebut tentunya bukan denda atau disiplin tetapi dapat dipaksakan, pedoman tidak ditetapkan terlebih

dahulu, balas jasa tambahan, terutama bagi warga yang menjadi identitas upah, digunakan untuk mencapai tujuan negara di bidang moneter dan sosial (Sobri, 2018). Retribusi diketahui bahwa suatu komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan, tanpa menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan orang perseorangan. Pengertian atau pengertian penilaian diketahui bahwa komitmen individu terhadap penitipan negara pandangan hukum (dapat ditegakkan) tanpa mendapatkan pelayanan yang proporsional (*counter performance*) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk melunasi biaya-biaya umum (Laser dan Rahmat, 2014).

Enga dkk (2019) mengatakan bea diketahui bahwa komitmen individu terhadap penitipan negara berdasarkan peraturan (yang dapat dilaksanakan) tanpa menerima administrasi pelengkap (kontrasepsi) yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan digunakan untuk melunasi biaya-biaya umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi: "Penilaian diketahui bahwa pertukaran kelimpahan dari individu ke penyimpanan negara untuk mendukung konsumsi rutin dan "kelebihannya" digunakan untuk dana cadangan publik yang merupakan sumber utama untuk mendukung usaha publik."

4. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah suatu pengeluaran material di darat atau rumah yang mungkin dibebankan kepada orang atau unsur yang benar-benar mempunyai hak serta mendapat manfaat dari tanah dan juga rumah yang memiliki, menguasai serta mendapat manfaat dari rumah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Siahaan (2010) Pajak bumi dan bangunan (PBB) diketahui bahwa sebagai berikut: "Pajak bumi dan bangunan diketahui bahwa biaya-biaya yang ada di darat serta rumah-rumah yang dimiliki, dikuasai, atau berpotensi dimanfaatkan oleh orang atau benda, kecuali wilayah. dimanfaatkan untuk kegiatan usaha peternakan, jasa ranger dan pertambangan". Pandangan Herry Purwono (2010) Pajak bumi dan bangunan (PBB) diketahui bahwa alasan yang sah untuk memaksakan tuntutan mengenai kebebasan atas tanah serta memperoleh manfaat dari tanah dan juga kepemilikan, wewenang atau potensi mendapatkan manfaat dari rumah. Barang Penilaian Tanah dan Rumah Objek beban dalam PBB diketahui bahwa tanah dan rumah. Yang dimaksud dengan tatanan tanah dan rumah diketahui bahwa berkumpulnya tanah dan rumah sesuai dengan nilai jualnya. Sebagaimana dikemukakan Wirawan dan Rudy Suhartono (2013), objek pungutan PBB diketahui bahwa sebagai berikut: "Pokok Bea Tanah dan Rumah diketahui bahwa tanah dan rumah tambahan.

Tanah meliputi lapisan tanah bagian luar dan tubuh tanah yang berada di bawahnya. Permukaan dunia meliputi daratan dan perairan pedalaman serta lautan regional di Indonesia. Rumah diketahui bahwa rumah khusus yang ditanam atau menyatu selamanya dengan daratan atau perairan termasuk: Jalan alami dalam kumpulan rumah, jalan tol, kolam renang, tembok mewah, taman elegan, tempat olah raga, galangan kapal, tegalan dan fasilitas penimbunan/pengolahan minyak, air dan gas, pipa minyak. Subyek Bea Pertanahan dan Rumah yang menjadi subjek pungutan diketahui bahwa orang perseorangan atau unsur yang benar-

benar mempunyai hak atas tanah yang tiada habisnya, serta mendapat manfaat dari rumah. Oleh karena itu, tanda terima angsuran/angsuran bea bukan merupakan penegasan penunjukan kebebasan. Biaya Tanah dan Rumah juga dapat diartikan sebagai kewajiban material karena besarnya biaya yang tidak seluruhnya dibayar oleh negara bagian, yaitu tanah/tanah atau rumah yang mungkin ada. Keadaan subjek (siapa yang melunasi) tidak menentukan berapa besar biayanya (Lubis, 2018).

Pedoman Provinsi Bagian Sinjai Urutan 34 Periode 2012 tentang Pengeluaran Tanah dan Rumah Negara dan Metropolitan dimana Bagian II Nama Barang, Subyek dan Warga Negara pada Bagian 3 dan Bagian 4 mempunyai arti:

- 1) Objek retribusi tanah dan rumah provinsi dan metropolitan diketahui bahwa tanah atau rumah yang berpotensi dikuasai, dikuasai, dan dipergunakan oleh orang atau unsur, kecuali wilayah yang dipergunakan untuk peternakan, jasa jagawana, dan kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Termasuk dalam pengertian bekerja sebagaimana dimaksud pada baris (1) diketahui bahwa :
 - a) Jalan lingkungan yang terletak pada suatu kompleks struktur, misalnya penginapan, jalur produksi dan lokasinya, yang merupakan bagian penting dari kompleks struktur tersebut;
 - b) Jalan tol;
 - c) Kolam renang;
 - d) Tembok mewah;
 - e) Lapangan olahraga;

- f) Galangan kapal, tegalan;
 - g) Taman mewah;
 - h) Fasilitas penimbunan/pengolahan minyak, air dan gas, jaringan pipa minyak; Dan
 - i) Menara.
- 3) Dikecualikan dari Pos Biaya Tanah dan Rumah Provinsi dan Metropolitan diketahui bahwa biaya protes yang:
- a) digunakan oleh Otoritas Publik dan Distrik untuk organisasi pemerintahan;
 - b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang cinta kasih, sosial, kesejahteraan, pelatihan dan kebudayaan warga, yang tidak direncanakan untuk kepentingan;
 - c) digunakan untuk kuburan, peninggalan kuno, atau sejenisnya;
 - d) merupakan hutan belantara yang dilindungi, hutan cagar alam, hutan belantara, taman umum, wilayah sentuhan yang dibatasi oleh wilayah, dan wilayah negara yang belum dihalangi hak-hak istimewanya;
 - e) digunakan oleh agen dan departemen perdamaian dengan mempertimbangkan standar perlakuan proporsional; Dan
 - f) digunakan oleh badan atau delegasi di seluruh dunia yang tidak ditetapkan oleh Pedoman Pastor Uang.
- 4) Nilai transaksi objek pengeluaran tidak tersedia ditetapkan sebesar Rp. 10.000.001,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap warga negara.

Dalam pasal 4 Peraturan daerah nomor 34 Tahun 2012 menjelaskan :

- 1) Subyek Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan diketahui bahwa orang perseorangan atau unsur yang benar-benar mempunyai hak pilih atas tanah tersebut atau berpotensi memperoleh manfaat dari tanah tersebut, serta memiliki, menguasai, atau berpotensi memperoleh manfaat dari rumah tersebut.
- 2) Tanah dan Rumah Pewilayahan dan Metropolitan Warga negara diketahui bahwa orang benda yang benar-benar mempunyai kebebasan atas tanah serta memperoleh manfaat dari tanah, dan juga memiliki, menguasai, atau berpotensi memperoleh manfaat dari rumah.
- 3) Dalam hal objek pengeluaran tidak diketahui dengan jelas oleh warga negara, Pejabat atau Pejabat dapat menentukan subjek kewajiban sebagai warga negara.
- 4) Yang belum diselesaikan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada baris (3) dapat memberikan keterangan tertulis kepada Pejabat atau pejabat bahwa yang bersangkutan bukan warga negara obyek tugas yang dimaksud.
- 5) Apabila data yang dikumpulkan oleh warga sebagaimana dimaksud pada baris (4) terbukti, Pejabat atau Pejabat membatalkan jaminan sebagai warga negara sebagaimana diharapkan pada baris (3) dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat wasiat tersebut. dimaksud.
- 6) Apabila data yang disampaikan tidak didukung, Pejabat atau Pejabat akan memberikan Surat Pernyataan Pemberhentian, disertai alasannya.

- 7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya data sebagaimana dimaksud pada baris (4), Pejabat atau Pimpinan Staf tidak memberikan pilihan maka data yang disampaikan dianggap terdukung.

Dalam Pedoman Wilayah Urutan 34 Periode 2012 tentang Bagian III Penawaran Nilai Barang Tidak Tersedia, Alasan Beban dan Ukuran Tarif Pengeluaran, serta Strategi Perhitungan Tarif Bagian 5 mengandung pengertian bahwa:

- 1) Alasan ketidaknyamanan Bea Pertanahan dan Rumah Perwilayahan dan Metropolitan diketahui bahwa NJOP.
- 2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada baris (1) diselesaikan dengan berjalan lancar, (selain objek-objek pengeluaran tertentu yang dapat diselesaikan secara konsisten sesuai dengan pergantian peristiwa wilayah.
- 3) Besaran NJOP sebagaimana direncanakan dalam perjalanan tidak ditetapkan dengan Pedoman Pejabat.
- 4) Tarif Biaya Tanah dan Rumah Perwilayahan dan Metropolitan ditetapkan sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen).
- 5) Besaran pokok utang Belanja Tanah dan Rumah Provinsi dan Metropolitan ditentukan dengan menggandakan tarif sebagaimana direncanakan dalam Bagian 6 dengan premis beban sebagaimana diharapkan dalam Bagian 5 baris (3) setelah dikurangi Nilai Usaha Tidak Tersedia Butir Tugas sebagaimana diharapkan dalam Bagian 3 baris (4).

Dalam Pedoman Kewilayahan Urutan 34 Periode 2012, Bagian VI, Bagian Kedua tentang Teknik Angsuran dan Pemilahan Bea, mengandung pengertian bahwa:

- 1) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 11 baris (1) harus dibayar paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Warga Negara.
- 2) STPD, SKPD, Surat Pilihan Koreksi, Surat Pilihan Protes dan Pilihan Daya Tarik yang menjadikan besarnya biaya yang harus dibayar bertambah menjadi alasan pembedaan biaya dan harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada baris (1) dan baris (2), apabila angsuran diharapkan atau tidak tercapai, bergantung pada persetujuan peraturan sebagai penerimaan sebesar 2% (dua persen) sebulan yang ditentukan sejak tanggal jatuh tempo. sampai hari angsuran untuk sementara waktu. batas 24 dua periode.
- 4) Pejabat atau pejabat, pandangan Warga Negara, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dapat memberikan persetujuan kepada Warga Negara untuk melunasi sebagian atau menunda angsuran tugas yang terutang karena peninjauan kembali, kemungkinan besar premi sebesar 2% (dua). persen) sebulan.
- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran, tanggal jatuh tempo angsuran, toko, tempat angsuran, porsi dan penangguhan kewajiban angsuran diatur dalam Pedoman Pejabat.

- 6) Angsuran Retribusi dilakukan di Tempat Penyimpanan Wilayah atau tempat lain yang dipilih oleh Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, atau STPD.
- 7) Apabila angsuran bea dilakukan pada satu tempat lain yang telah ditetapkan, maka penerimaan pengeluarannya harus disimpan ke dalam Penyimpanan Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- 8) Bukti angsuran bea sebagaimana dimaksud pada baris (1) dan baris (2) berupa SSPD atau catatan lain yang sejenis.
- 9) Retribusi-retribusi yang terutang atas SPPT, SKPD, STPD, Surat Pilihan Koreksi, Surat Pilihan Pengaduan, dan Surat Pilihan Tunjangan yang tidak dibayar atau terlambat dibayar oleh Warga Negara pada waktunya, dapat dipungut dengan menggunakan surat paksa.
- 10) Pemilahan retribusi dengan Surat Batasan dilakukan berdasarkan pengaturan hukum.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja keuangan suatu wilayah. Mengingat peraturan urutan 32 periode. Periode 2004 tentang Pemerintahan Wilayah dan Peraturan Urutan 32 periode. Periode 2004 tentang Keserasian Keuangan antara DPRD dan pemerintah wilayah, gaji pokok provinsi diketahui bahwa gaji yang diperoleh wilayah dan dikumpulkan berdasarkan peraturan wilayah sesuai peraturan perperaturan, meliputi:

Bea wilayah dan tol wilayah Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Urutan 28 Periode 2009 tentang Retribusi Provinsi dan Biaya

Angkutan Provinsi Bagian II Bagian Kesatu Jenis Bea Bagian 2, yang macam beanya terdiri dari bea masuk umum dan bea wilayah/wilayah. Di mana:

a. Jenis pungutan umum terdiri dari:

1) pajak kendaraan;

Dalam bagian 3, tarif mesin kendaraan tergantung pada kepemilikan dan juga penguasaan atas kendaraan mesin. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor antara lain kendaraan bermotor beroda beserta trailernya yang bergerak di berbagai jalan darat, serta kendaraan bermotor di air dengan batas maksimal GT 5 (5 gros ton) sampai dengan GT 7 (7). ton kotor). Yang dimaksud dengan kendaraan mekanis tidak termasuk kereta api, kendaraan mekanis yang digunakan semata-mata untuk alasan penjagaan dan keamanan umum, konsulat, tenaga ahli, misi asing, dan kantor kendaraan mekanis yang dimiliki atau berpotensi dibatasi oleh badan-badan global mengingat pedoman korespondensi.

2) Biaya bahan bakar kendaraan bermotor;

Bagian 16 Biaya bahan bakar kendaraan bermotor dituntut terhadap bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan atau dianggap untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Biaya bahan bakar mesin kendaraan merupakan salah satu jenis pengeluaran yang diingat untuk tugas-tugas umum. Yang dimaksud dengan bahan bakar kendaraan bermesin itu sendiri diketahui bahwa berbagai macam bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk mesin kendaraan,

sedangkan muatannya dibebankan pada penggunaan bahan bakar kendaraan bermesin yang diberikan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermesin.

3) Retribusi pemindahan hak milik kendaraan bermotor;

Bagian 9 mengatur bahwa yang menjadi subyek perpindahan kepemilikan kendaraan bermesin diketahui bahwa pertukaran kepemilikan kendaraan bermesin. Kendaraan bermotor diketahui bahwa kendaraan bermotor dengan angkutan yang bergerak di berbagai jalan darat, serta kendaraan bermotor di perairan dengan batas lengkap GT 5 (5 gros ton) sampai dengan GT 7 (7 gros ton). Bea Perpindahan Hak Milik Kendaraan Bermesin itu sendiri merupakan kewajiban atas pertukaran hak kepemilikan kendaraan bermesin karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau kegiatan atau keadaan sepihak yang terjadi karena jual beli, perdagangan, hadiah, warisan, atau bagian menjadi suatu elemen bisnis. Hanya kendaraan mekanis yang digunakan untuk perlindungan dan keamanan negara, konsulat, spesialis, misi asing, dan kantor bebas retribusi kendaraan mekanis dimiliki dan juga dibatasi oleh badan-badan internasional berdasarkan aturan korespondensi.

4) Pajak rokok

Dalam bagian 26, objek pungutan rokok diketahui bahwa pemanfaatan rokok. Rokok termasuk rokok, cerutu dan rokok daun tembakau. Rokok yang tidak terkena ekstrak, dikecualikan dari ekstrak rokok sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman

di bidang ekstrak. Subyek pungutan rokok diketahui bahwa pemanfaatan rokok. Warga Rokok diketahui bahwa visioner/penghasil usaha tanaman rokok dan pedagang rokok yang mempunyai hibah sebagai visioner usaha yang membedakan urutan bukti barang kena cukai. Pungutan rokok dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan ekstrak rokok oleh kantor-kantor pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengumpulkan ekstrak. Pungutan rokok yang dikumpulkan oleh organisasi pemerintah disimpan ke dalam penyimpanan umum sesuai dengan jumlah barangnya.

5) pajak air permukaan;

Dalam bagian 21, pajak air permukaan bergantung pada pengambilan dan penggunaan air permukaan.

b. Jenis retribusi kabupaten dan kota terdiri atas:

1) pajak hotel;

Objek pajak penginapan diketahui bahwa administrasi yang diberikan oleh angsuran penginapan termasuk administrasi penunjang sebagai embel-embel penginapan yang memberikan akomodasi dan hiburan, termasuk sarana olah raga dan hiburan.

Dalam bagian 32 disyaratkan biaya penginapan atas pelayanan berbayar yang diberikan oleh penginapan, termasuk administrasi tambahan sebagai penginapan secara keseluruhan, pemberian kenyamanan dan ketenangan, termasuk sarana olah raga dan hiburan. Administrasi tambahan yang dimaksud meliputi telepon, faks, kawat, web, fotokopi, pakaian, mesin press, transportasi dan

kantor serupa lainnya yang diberikan atau diawasi oleh penginapan. Tidak termasuk layanan penginapan di klinik, panti asuhan, panti jompo, shelter dan yayasan sosial sejenis lainnya, serta layanan penginapan tempat tinggal yang diberikan oleh pemerintah wilayah atau pemerintah wilayah. Subyek retribusi penginapan diketahui bahwa orang perseorangan atau benda yang menyebabkan angsuran kepada orang atau unsur yang mengerjakan penginapan. Alasan biaya penginapan diketahui bahwa jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak penginapan, dimana tarif biaya penginapan ditetapkan sebesar 10% (10%).

2) Pajak restoran;

Sedangkan menurut Phaureula Artha (2018), pajak restoran merupakan tarif provinsi atas layanan yang diberikan oleh tempat makan, termasuk penyediaan makanan atau minuman yang mungkin diminum oleh pembeli, baik yang disajikan di area layanan atau di tempat lain. Biaya pemesanan tidak termasuk layanan yang diberikan oleh restoran-restoran yang harga penawarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

3) Pajak reklame;

Pandangan Siti Kurnia Rahayu (2010), pajak reklame merupakan biaya yang ditampilkan kepada orang atau pihak yang memperkenalkan iklan. Sedangkan pandangan Marihot Pahala Siahaan (2010), biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan iklan. Berdasarkan penjelasan dari para ahli

tersebut, ciri dari promosi penghasilan pungutan yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa pengakuan atas publikasi penerima manfaat pungutan.

4) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;

Bagian 77 Tanah dan rumah metropolitan dan pewayahyan yang dipungut paksa ke darat serta rumah-rumah yang diklaim, dikuasai dan dimanfaatkan tambahan oleh orang atau unsur, kecuali wilayah yang dimanfaatkan untuk rumah bangsawan, jasa penjaga hutan, dan kegiatan usaha pertambangan. Yang dimaksud dengan rumah antara lain jalan-jalan ekologis yang terletak di dalam suatu kompleks rumah (seperti penginapan, tanaman dan penggantinya) yang merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari suatu kompleks rumah, jalan tol, kolam renang, tembok mewah, arena olah raga, taman mewah. , pabrik pengolahan air dan gas, jaringan pipa minyak dan puncak. Disebutkan Erly Suandy, biaya tanah dan rumah diketahui bahwa biaya material dan besarnya biaya yang tidak ditentukan oleh keadaan barang, yaitu tanah, tanah dan rumah. Keadaan subjek (siapa yang melunasi) tidak menentukan berapa besar beanya.

5) Biaya Pengadaan Hak Istimewa Tanah dan bangunan

Keistimewaan penyitaan dan pemanfaatan rumah dalam Bagian 85 kemungkinan akan membebani penyitaan atau berpotensi memalsukan kebebasan pemanfaatan. Perolehan hak-hak istimewa atas tanah dan rumah mencakup jaminan kebebasan melalui kesepakatan, perdagangan, hadiah, wasiat, warisan,

pembagian ke dalam suatu organisasi atau hak sah lainnya, pembagian yang menyebabkan perpindahan, pengaturan pembeli pada saat penjualan, pelaksanaan kebebasan yang sangat tahan lama.

6) retribusi Air Tanah;

Retribusi air tanah dalam pasal 67 dikenakan pada pengambilan serta pemanfaatan air tanah. Pengecualian dari pungutan air tanah diketahui bahwa untuk pengambilan dan juga pemanfaatan air tanah untuk keperluan pokok keluarga, sistem pengairan untuk keperluan hortikultura dan perikanan perorangan, serta pengambilan atau kemungkinan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan yang ketat dan pedoman lokal lainnya. Untuk urusan retribusi air tanah ada tiga pihak, yakni pihak atau pelaku usaha sebagai pihak yang perlu menyelesaikan retribusi air tanah, DLH sebagai pihak yang memberikan retribusi airtanah nyata, dan badan pengawas tugas wilayah dan provinsi (BPPDRD).) selaku pihak yang menpengajars angsuran biaya air tanah yang dibayar oleh perseorangan atau unsur usaha.

7) Retribusi penerangan jalan;

Retribusi penerangan jalan pada pasal 52 dipungut atas pemanfaatan tenaga listrik yang diproduksi sendiri atau tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Yang disebut usia mandiri memadai untuk semua usia tenaga listrik, yang tidak termasuk dalam Biaya Penerangan Jalan diketahui bahwa lembaga pemerintah dan pemerintah wilayah yang memanfaatkan tenaga

listrik, konsulat dan tenaga ahli serta misi asing yang memanfaatkan tenaga listrik, konsulat dan departemen serta delegasi asing yang pemanfaatan tenaga listrik di tempat-tempat yang penggunaannya berdasarkan pedoman persuratan, dan menghasilkan tenaga listrik dengan batas tertentu sesuai dengan keperluan sendiri dan tidak memerlukan izin dari dinas khusus yang bersangkutan.

8) retribusi Parkir

Pasal 62 Objek retribusi parkir diketahui bahwa pengaturan jalan keluar jalan, termasuk yang berhubungan dengan usaha utama atau diberikan sebagai suatu pergerakan usaha, termasuk pengaturan daya tampung kendaraan bermotor. Yang ditolak dari pemungutan retribusi diketahui bahwa: otoritas publik dan badan legislatif terdekat yang mengawasi cuti kendaraan, cuti kendaraan kerja hanya untuk tempat kerja pekerjanya sendiri, dan cuti kendaraan kerja di tempat perlindungan internasional, departemen dan tempat kerja agen di luar negeri. Aturan korespondensi dengan kegiatan cuti kendaraan lain. Sesuai pedoman terdekat.

Dalam pasal 77 UU Nomor 38 Tahun 2008 mempunyai arti bahwa:

- 1) Pos Bea Pertanahan dan Rumah Perwilayahan dan Metropolitan diketahui bahwa Tanah atau rumah potensial yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan tambahan oleh orang atau Benda, kecuali

wilayah yang dimanfaatkan untuk rumah bangsawan, jasa ranger, dan kegiatan usaha pertambangan.

- 2) Termasuk dalam pengertian rumah diketahui bahwa :
 - a) Jalan Lingkungan yang terletak dalam satu kompleks struktur seperti penginapan, pabrik, dan emplasemen, yang merupakan bagian mendasar dari kompleks struktur tersebut.
 - b) Jalan tol
 - c) Kolam renang
 - d) Dinding mewah
 - e) Adegan olahraga
 - f) Galangan kapal, tegalan
 - g) Taman yang mewah
 - h) Fasilitas penimbunan/pengolahan minyak, air dan gas, pipa minyak
 - i) Menara
- 3) Pos-pos retribusi yang tidak dikenai Biaya Tanah dan Rumah Negara dan Metropolitan diketahui bahwa pungutan-pungutan protes yang:
 - a) Pemerintah dan wilayah digunakan untuk mengarahkan pemerintahan
 - b) Hanya digunakan untuk kepentingan umum di bidang agama, kewargaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kebudayaan warga, dan bukan untuk mencari kemaslahatan.
 - c) Untuk ruang pemakaman, peninggalan purbakala, dan sebagainya

- d) Ini diketahui bahwa kawasan hutan yang dilindungi, kawasan hutan belantara, lahan hutan bagi wisatawan, taman umum, padang rumput yang dibatasi oleh wilayah, dan lahan milik negara, tanpa hak istimewa.
 - e) Digunakan oleh delegasi dan departemen perdamaian sesuai pedoman korespondensi.
 - f) Digunakan oleh badan atau delegasi global yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh Pedoman Imam Uang.
- 4) Nilai transaksi objek pengeluaran tidak tersedia ditetapkan paling sedikit Rp10.000.001,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap warga negara.
- 5) Penawaran senilai Item Pengeluaran Tidak Tersedia seperti yang diharapkan dalam perjalanan masih ditentukan oleh Pedoman Provinsi.

Bagian 78 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

- 1) Subjek penguasaan tanah dan rumah metropolitan dan pewilayahan diketahui bahwa orang perseorangan atau badan yang benar-benar mempunyai hak atas tanah atau berpotensi mendapat hak atas tanah, dan juga mempunyai, menguasai, serta memperoleh hak atas tanah dan rumah.
- 2) Tanah dan Rumah Perwilayahan dan Pewilayahan Warga diketahui bahwa orang-orang atau unsur-unsur yang benar-benar mempunyai keistimewaan dan manfaat dari, atau berpotensi

memiliki, menguasai, dan juga memanfaatkan rumah-rumah yang ada di tanah.

Bagian 79 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti:

- 1) Biaya tanah dan rumah perwilayahan dan pewelirahan dipungut berdasarkan NJOP
- 2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada baris (1) diselesaikan dengan berjalan lancar, namun sebenarnya bagian-bagian tugas tertentu dapat diselesaikan secara konsisten dengan bergantung pada peristiwa provinsi.
- 3) Kepastian berapa besarnya NJOP yang diharapkan pada baris (2) dilakukan oleh pimpinan provinsi.

Bagian 80 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

- 1) Tarif biaya tanah dan rumah perwilayahan dan pewelirahan dibatasi hingga 1,3%
- 2) Tarif retribusi untuk wilayah metropolitan dan negara dan masih di udara berdasarkan pedoman provinsi.

Bagian 81 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

Besarnya retribusi tanah dan rumah yang terutang oleh wilayah perwilayahan dan pewelirahan ditentukan dengan memindahkan tarif pengeluaran sebagaimana direncanakan dalam Bagian 80 angka 2 ke dasar bea sebagaimana diharapkan dalam Bagian 79 angka 3 dan

dikurangi kesepakatan. Barang Dagangan Tidak Tersedia sebagaimana direncanakan pada Ayat 2 Pasal 80 Bagian 77 Ayat 5.

Bagian 82 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

- 1) Periode Retribusi diketahui bahwa waktu dalam 1 (satu) periode kalender.
- 2) Waktu penetapan biaya yang harus dibayar diketahui bahwa sesuai keadaan objek bea pada tanggal 1 Januari
- 3) Tempat terutangnya biaya diketahui bahwa di wilayah wilayah yang termasuk wilayah objek bea.

Bagian 83 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

- 1) Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan SPOP
- 2) SPOP sebagaimana dimaksud pada baris (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan lengkap, diberi tanda dan diserahkan kepada Pengawas Wilayah tempat kerja termasuk wilayah Warga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah angsuran biaya diterima.

Bagian 84 Peraturan Urutan 28 Periode 2009 mempunyai arti bahwa:

- 1) Berdasarkan SPOP, Pimpinan Wilayah memberikan SPPT.
- 2) Pimpinan Wilayah dapat memberikan SKPD dalam hal :
 - a) Setelah tidak menunjukkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Bagian 83 baris (2) dan Warga telah mendapat teguran tertulis dari pimpinan wilayah yang dituangkan dalam surat pemberitahuan terlebih dahulu.

- b) Berdasarkan hasil survei atau data lain, biaya yang harus dibayar lebih besar dari penilaian yang ditentukan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Warga Negara.

Sesuai Peraturan Urutan 28 Periode 2009 Bagian V Pemilahan Biaya Bagian Kesatu Cara Pemilahan Bagian 96 mempunyai arti bahwa:

- 1) Pemilahan retribusi tidak termasuk.
- 2) Setiap warga negara wajib melunasi biaya yang terutang oleh pengaturan penilaian atau biaya yang dibayarkan oleh warga negara sebagaimana ditentukan oleh peraturan dan pedoman biaya.
- 3) Wajib Retribusi yang memenuhi komitmen penilaian berdasarkan pilihan pimpinan wilayah, dibayar dengan menggunakan SKPD atau catatan lain yang dipersamakan.
- 4) Laporan lain sebagaimana dimaksud pada baris (3) bersifat tagihan dan perkiraan

Warga negara yang memenuhi kewajiban tugasnya melunasi dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Sesuai Peraturan Urutan 28 Periode 2009 Bagian VI Balas Dendam Bagian Kesatu Bagian dan Golongan Pembalasan mengandung pengertian bahwa objek balas dendam terdiri atas:

- 1) Jenis tuntutan bantuan umum:
 - a) Tol Pelayanan Kesehatan
 - b) Tol Administrasi Sampah/Kebersihan

- c) Retribusi pelunasan biaya pencetakan Kartu Kepribadian Penghuni dan Akta Perpustakaan Umum.
 - d) Tugas Administrasi Pemakaman dan Administrasi Penginterniran
 - e) Retribusi atas Penghentian Administrasi demi Jalan Umum
 - f) Tugas Administrasi Pasar
 - g) Tugas Tes Kendaraan Bermotor
 - h) Penilaian Pemadam Kebakaran Tol
 - i) Retribusi Pelunasan Biaya Pencetakan Panduan
 - j) Retribusi Penataan dan Penataan Toilet
 - k) Tugas Penanganan Limbah Cair
 - l) 3 Pembalasan terhadap Administrasi Tera/Re-Tera
 - m) Tugas Administrasi Pendidikan
 - n) Tol Puncak Kendali Telekomunikasi
- 2) Jenis retribusi jasa usaha:
- a) Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Provinsi
 - b) Pasar Grosir atau kemungkinan Bea Toko
 - c) Tol Tempat Pelelangan
 - d) Terminal Tol
 - e) Penghentian Balas Dendam Khusus
 - f) Pembalasan Penginapan/Swasta/Manor
 - g) Tol Rumah Potong Hewan
 - h) Tol Administrasi Pelabuhan
 - i) Retribusi Tempat Hiburan dan Olah Raga
 - j) Biaya Penyeberangan Air

- k) Tugas Kesepakatan Penciptaan Usaha Wilayah
- 3) Jenis Bea Perizinan Tertentu:
 - a) Tol Izin Mendirikan Rumah
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Cocktail
 - c) Bea Lisensi Gangguan
 - d) Bea Izin Proyek
 - e) Izin Perikanan untuk menjalankan Tugas n

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, sehingga para ilmuwan dapat menyempurnakan hipotesis yang digunakan sebagai bahan korelasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam ulasan ini, ilmuwan memasukkan hasil-hasil penelitian yang penting atau penting bagi Penelitian yang akan dipimpin.

Akibat dari pencarian beberapa tulisan yang dimaksud antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
1.	Firman syah & Nurdiana, 2022	Efektivitas Pemungutan Retribusi Tanah Dan		metode kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan dan Rumah (PBB) bahwa

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
		Rumah Dalam Wilayah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun Peningkatan Penghasilan Asli 2018–2020			pemungutan Retribusi Tanah di Desa Padamukti telah efektif meningkatkan Penghasilan Asli Wilayah (PAD). online telah berjalan baik, tetapi sesuai SOP karena Proses input persyaratan perretribusi kurangnya pemahaman sumber pengolahan data masih belum sepenuhnya daya Badan Pelayanan Retribusi Wilayah

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					<p>(BAPEDA). retribusi sesuai waktu manusia terhadap aturan yang diterapkan oleh, namun kurangnya disiplin dan Proses administrasi pembayaran efektivitas kerja terutama dalam mengatasi perubahan data wajib retribusi. Meskipun menyebabkan penumpukan pekerjaan, output dari BAPEDA dan pihak terkait untuk</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar sudah baik, perlu peningkatan retribusi, dengan fokus pada pemahaman, disiplin, dan perbaikan proses pengolahan data.
2.	(Jauhari et al., 2022)	Hubungan Retribusi Tanah dan Rumah (PBB) dan Bea as Tanah dan		Menggunakan Tes Chow (Statistik F), Tes Haussman, Selain itu menggunakan	PBB berhubungan positif dan signifikan terhadap di Provinsi Sumatera Barat. Begitupula BPHTB berhubungan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
		Rumah (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Bagian perolehan Hak AtProvinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020		tes hipotesis yaitu Tes T (Tes Analisis Regresi data panel. Koefisien regresi, Tes Determinasi (R ²).	retribusi wilayah 19 Bagian/Kota positif terhadap retribusi wilayah 19 Bagian/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3.	(Agustina & Adhianto, 2021	Hubungan Retribusi Tanah Rumah Dan Retribusi Penerangan Jalan Terhadap Penghasilan	Retribusi Properti (PBB), Retribusi Penerangan Jalan, dan Penghasil	metode penelitian kuantitatif, meliputi analisis korelasi, tes hipotesis, dan analisis koefisien	Retribusi Tanah Rumah (PBB) dan retribusi dampak positif dan signifikan terhadap penerangan jalan memiliki (PAD) Bagian Sumedang periode tahun

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
		Asli Bagian Sumedang Periode 2016-2020	lan Asli Wilayah (PAD) Bagian Sumedan g periode 2016-2020	determinasi	ganda menunjukkan Penghasilan Asli Wilayah adanya hubungan dan Retribusi Penerangan 2016-2020. Analisis regresi linear Jalan) antara variabel independen (PBB dengan variabel dependen (PAD). Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen secara bersamaan mampu memberi

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					<p>hubungan atas PAD sebanyak 31,4%. Meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga diperlukan evaluasi dan himbauan demikian, penerimaan retribusi kepada memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperpanjang wajib retribusi. Studi ini juga durasi riset dan menambahkan variabel lain yang</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					juga berhubungan terhadap PAD.
4.	(Juwita, Mulyanti, & Ainur Rahman, 2022)	Hubungan Retribusi Tanah Dan Rumah Terhadap Penghasilan Asli Wilayah (PAD) Pada Pemerintah Bagian Ciamis Periode 2018-2020	Variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).	analisis korelasi momen produk Pearson, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan tes-t	Berdasarkan hasil tes Tes t bahwa Ha diterima dan Ho tes pihak kanan. Dari hasil tes tes t diperoleh thitung > ttabel ditolak, tes tes t dilakukan satu arah yaitu atau $34,298 > 1,6909$ yang berada di bawah signifikansi 1,05 dan angka signifikansi sebesar bahwa Retribusi Tanah dan Rumah berhubungan . Hal

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					ini menunjukkan signifikan terhadap Penghasilan Asli Wilayah (PAD) pada Pemerintah Bagian Ciamis Periode 2018-2020.
5.	(Rufaidah & Dais Muharom, 2022)	Hubungan Penerimaan Retribusi Tanah Dan Rumah Terhadap Penghasilan Asli Wilayah Kota Bandung	penerimaan retribusi tanah dan rumah (PBB), penerimaan retribusi iklan, dan penerimaan asli wilayah (PAD) di Kota	Analisis regresi linier berganda. Selain itu, menggunakan tes asumsi klasik, analisis korelasi, tes koefisien determinasi, tes hipotesis, dan analisis	penerimaan retribusi tanah dan rumah (PBB) memiliki hubungan terhadap penghasilan asli wilayah (PAD) di Kota yang signifikan dan positif Bandung, sementara penerimaan memiliki hubungan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
			Bandung	koefisien regresi parsial (tes-T) dan berganda	tidak signifikan. Secara retribusi reklame simultan, kedua penerimaan retribusi yang positif namun tersebut berhubungan signifikan terhadap PAD.
6.	(Indah Lestari & Hutami Wulandari, 2022)		Penerimaan retribusi tanah dan rumah (X1) Kontribusi retribusi tanah dan rumah (X2) Penghasilan lokal kota Makassar	analisis regresi linier berganda. Selain itu, uji t dan tes F juga digunakan untuk mengtes signifikansi variabel.	penerimaan dan kontribusi retribusi tanah dan rumah berhubungan asli wilayah di Kota Makassar. Nilai R square terhadap penghasilan sebesar 1,563 56,3% penghasilan asli wilayah

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
			(Y)		<p>dipengaruhi oleh variabel menunjukkan bahwa tersebut. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa terdapat antara penerimaan dan kontribusi retribusi tanah dan hubungan signifikan rumah asli wilayah kota Makassar. terhadap penghasilan</p> <p>Referensi yang ini mencakup berbagai sumber terkait digunakan dalam penelitian</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					perretribusi dan penghasilan asli wilayah.
7.	(Trisna, 2022)	Hubungan Retribusi Tanah Dan Rumah Terhadap Penghasilan Asli Wilayah Di Bagian Tolitoli Periode 2015-2020	Penelitian ini menggunakan akan retribusi tanah dan rumah sebagai variabel independen dan penghasilan asli wilayah sebagai variabel dependen	analisis regresi linier sederhana, yang memenuhi asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi	Retribusi Tanah dan Rumah positif namun tidak signifikan terhadap penghasilan asli wilayah di bagian Tolitoli. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa retribusi hubungan positif yang signifikan terhadap penghasilan asli

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					<p>wilayah. Koefisien nilai determinasi 1,610817 dapat dijelaskan oleh variabel independen menunjukkan bahwa 61% variabel dependen. Oleh karena itu, kesimpulannya retribusi tanah dan rumah tidak positif yang signifikan terhadap penghasilan memberikan hubungan asli wilayah di Bagian Tolitoli.</p>
8.	(Wibisono &	Efektivitas	Efektivitas	metode	Hasil penelitian

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
	Sri Mulyani, 2019)	Retribusi Tanah Rumah Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Penghasilan Asli Wilayah (PAD) Di Bagian Tasikmalaya	pemungutan retribusi tanah dan rumah Kontribusi terhadap penghasilan pemungutan retribusi tanah dan rumah di Bagian Tasikmalaya retribusi wilayah Penghasilan an wilayah Kriteria untuk menilai efektivitas	analisis kuantitatif deskriptif untuk menilai efektivitas pemungutan retribusi tanah dan rumah di Bagian Tasikmalaya	menunjukkan bahwa retribusi tanah dan rumah di Bagian dan memberikan kontribusi wilayah. Studi ini Tasikmalaya efektif juga menemukan bahwa signifikan terhadap penghasilan retribusi tanah dan rumah di wilayah dikategorikan wilayah pada tahun 2018. Selain efektif, dengan kontribusi sebesar 35,43% terhadap penghasilan itu,

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
			Variabel-variabel ini sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas dan kontribusi retribusi tanah dan rumah terhadap penghasilan asli wilayah Bagian Tasikmalaya		pemungutan retribusi wilayah pada tahun ini menunjukkan pentingnya 2018 sangat efektif, dengan persentase 111,8%. Temuan dan dalam berkontribusi terhadap efektivitas retribusi tanah dan rumah penghasilan wilayah.
9.	(Nur	Hubungan	Penerima	menggunakan	penelitian

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
	Madina et al., 2022)	Penerimaan Retribusi Tanah dan Rumah Terhadap Penghasilan Asli Wilayah Bagian Pekalongan Periode 2016-2020	an Retribusi Tanah dan Rumah (PBB) sebagai variabel independen dan Penghasilan Asli Wilayah (PAD) sebagai variabel dependen	n metode analisis data dengan tes asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien korelasi berganda, dan analisis hipotesis dengan tes t dan tes f	menunjukkan bahwa penerimaan PBB berhubungan namun tidak Asli Wilayah di Bagian Pekalongan periode secara signifikan terhadap Penghasilan 2016-2020. Juga, tidak terdapat hubungan yang signifikan (PBB) terhadap penghasilan asli wilayah (PAD) di Bagian antara retribusi tanah dan rumah Pekalongan periode yang sama.
10.	(Biki & Udaili,	Hubungan Retribusi	Variabel Independen	tes asumsi klasik,	Hasil penelitian menunjukkan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
	2020)	Hotel, Retribusi Restoran, dan dam Retribusi Hiburan Terhadap Penghasilan Asli Wilayah Bagian Bone Bolango	en: Retribusi Hotel (X1): Realisasi Retribusi Hotel Retribusi Restoran (X2): Realisasi Retribusi Restoran Retribusi Hiburan (X3): Realisasi Retribusi Hiburan Sedangkan Variabel	termasuk normalitas, multikolinear itas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi Tes hipotesis dilakukan dengan menggunakan tes-F dan tes-t untuk mengetahui hubungan simultan dan parsial variabel independen terhadap	bahwa secara simultan, Restoran, dan Retribusi retribusi (Retribusi Hotel, Retribusi Hiburan) (PAD). Secara parsial, Retribusi Hotel tidak berhubungan Penghasilan Asli Wilayah positif dan signifikan terhadap signifikan terhadap PAD, Retribusi Restoran berhubungan negatif dan signifikan, dan Retribusi Hiburan berhubungan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
			Depende n: Penghasil an Wilayah (Y)	variabel dependen	negatif dan berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Analisis juga menunjukkan bahwa tidak terjadi ini. Potensi penerimaan retribusi autokorelasi dalam model penelitian restoran di Bagian Bone perlu ditingkatkan, sementara retribusi Bolango sangat besar dan hiburan tidak begitu potensial. Bagian Bone Bolango yang

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
					<p>besar namun pengelolaan memiliki potensi pariwisata dan belum dilakukan secara maksimal. Kesimpulannya, retribusi pengembangan potensi wisata restoran memiliki kontribusi besar terhadap PAD, sementara retribusi hotel dan hiburan tidak begitu berpengaruh.</p>

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan klarifikasi sementara peneliti terhadap suatu objek persoalan yang muncul. Menyusun suatu sistem dalam pandangan

penulisan survei dan hasil Penelitian masa lalu yang saling berhubungan dan relevan. Struktur merupakan pertimbangan para ahli dalam menentukan suatu spekulasi. Untuk strategi kuantitatif, dalam menentukan spekulasi, dan dalam hal mencurigai, alasan rasional dapat digunakan dengan informasi sebagai premisnya. Berikut ini ditampilkan struktur penalaran variabel dependen dan faktor bebas, khususnya dimana retribusi tanah dan rumah merupakan retribusi fokus pemerintah dan dilimpahkan sebagai tugas langsung dan dikumpulkan secara konsisten. Mengingat survei terhadap premis hipotetis dan penelitian sebelumnya, struktur berikut dapat disiapkan:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Teori kepatuhan dicetuskan oleh Stanley Milgram dimana pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Wijayanti et al., 2022). Kajian teori kepatuhan dapat digunakan

untuk mengetahui budaya “dikabupaten sinjai” mempegaruhi konteks pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di badan pendapatan asli daerah. Adapun Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bachri & M. Halim (2011) dengan judul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis adalah:

H1 : Pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai, maka metode penelitian yang digunakan mengacu pada metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis data dalam penelitian ini termasuk dalam data sekunder, yaitu data yang diambil dari data yang telah ada/tersedia. Data tersebut mencakup semua data Pendapatan Asli Daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi : Penelitian ini dilakukan pada badan pendapatan daerah sebagai sebagai fokus pengumpulan informasi yang bertempat dikabupaten sinjai.
2. Waktu : penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2024.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, suatu yang mempunyai karakteristik tertentu sedangkan sampel merupakan bagian dari popuasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah di kabupaten sinjai dari tahun 2019-2023 dengan sumber pendapatan asli daerah. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten sinjai pada tahun 2019-2023.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai (2019-2023)

Tahun	Target (Dalam miliar rupiah)	Realisasi (Dalam miliar rupiah)	%
2019	27,12	28,34	104,53%
2020	28,5	25,14	88,21%
2021	30	31,22	104,07%
2022	32	33,56	104,88%
2023	17	15,96	93,94%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (2024)

D. Jensi Dan Sumber Data

Informasi yang digunakan merupakan informasi pada Badan Pendapatan daerah kabupaten Sinja, Dimana dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu, menggunakan laporan keuangan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sinjai

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian digunakan mendapatkan berbagai informasi maupun data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono 2022). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaporan dan arsip pelaporan, dan juga menggunakan metode

kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa sumber tertulis baik dalam media elektronik maupun media buku yang dirangkum dalam bentuk kajian pustaka.

F. Variabel Penelitian

Sugiono (2015) berpendapat bahwa variabel Penelitian adalah suatu karakteristik atau kualitas atau nilai dari suatu individu, benda atau gerakan yang tidak ditetapkan oleh ilmuwan untuk dipusatkan dan kemudian diakhiri dengan ditarik. Kerlinger (1973) dalam Sugiono (2017) menyatakan bahwa faktor diketahui bahwa rumah atau karakteristik yang akan diteliti.

Berdasarkan definisi tersebut, cenderung diasumsikan bahwa variabel penelitian diketahui bahwa merek dagang, suatu kualitas yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh ilmuwan untuk dikonsentrasikan untuk mendapatkan data yang dapat diambil tujuannya. Faktor yang dites dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen dalam Penelitian ini, yaitu pajak bumi dan bangunan sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu, menggunakan laporan keuangan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sinjai. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling yaitu sampling purposive. Menurut Sugiyono (2019) "Sampling purposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sinjai Pada

Tahun 2019-2023. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, analisis regresi linier sederhana dan uji t.

1. Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment dan Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2017) Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2017) Koefisien korelasi product moment merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama. Koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2), koefisien ini disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependent dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independent.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan persamaan koefisien korelasi product moment karena data yang memiliki skala ukur rasio. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut:

Keterangan:

n = Jumlah titik pasangan (X, Y)

X = Nilai variabel X (PBB)

Y = Nilai variabel Y (PAD)

Korelasi product moment dilambangkan (r) koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negative terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau = -1, maka hubungan tersebut

sempurna. Selanjutnya untuk menentukan besar kecilnya angka variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus korelasi determinan sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinan

r = Nilai Koefisien Korelasi

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Pada analisis regresi suatu variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas atau independen variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. dari regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait.

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Data:

Y = Variabel dependen (Variabel terikat)

X = Variabel independen (variabel bebas)

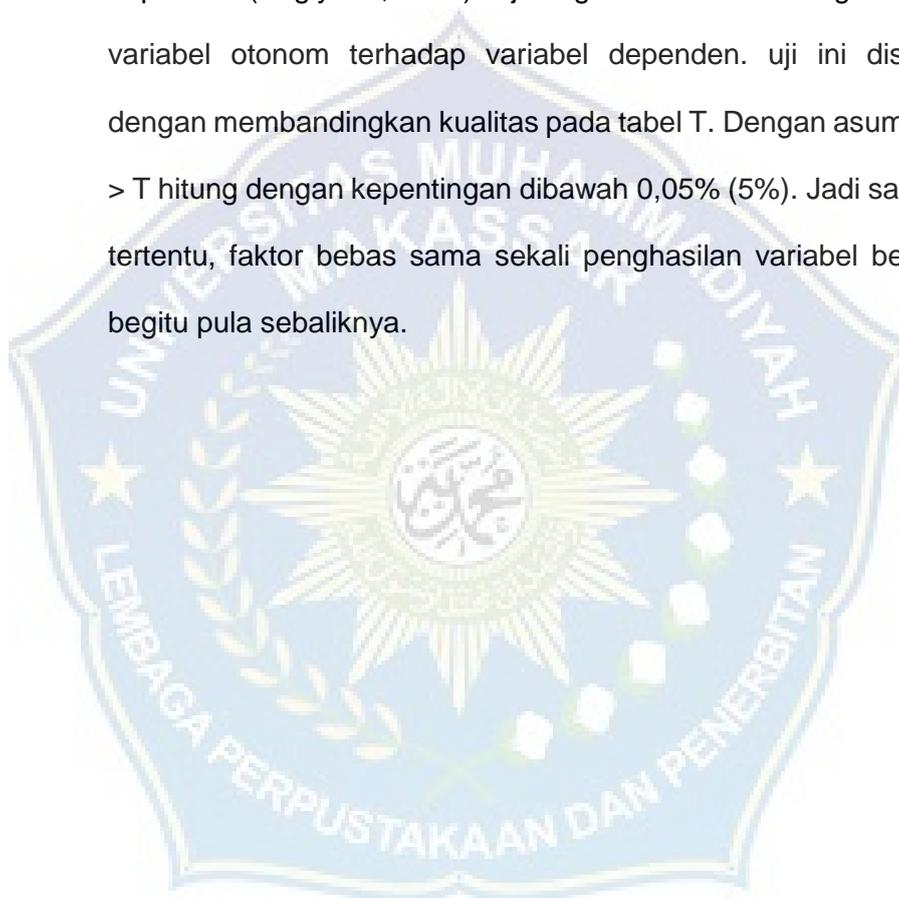
a = Konstanta (Nilai dari Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (Dampak positif atau negatif)

3. Uji Statistik Parametrik

1. Uji Parsial (uji t)

Uji parsial merupakan uji yang dapat diukur secara individual untuk mengetahui hubungan setiap faktor bebas terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2005). Uji t digunakan untuk mengtes hubungan variabel otonom terhadap variabel dependen. uji ini diselesaikan dengan membandingkan kualitas pada tabel T. Dengan asumsi T tabel $> T$ hitung dengan kepentingan dibawah 0,05% (5%). Jadi sampai taraf tertentu, faktor bebas sama sekali penghasilan variabel bergantung, begitu pula sebaliknya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah

Badan pendapatan daerah kabupaten sinjai merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten sinjai yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam mengelola pendapatan daerah kabupaten sinjai. kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dan atau pengaruh terhadap pertumbuhan daerah.

Dinas pendapatan daerah kabupaten sinjai yang bertempat di jalan bulo-bulo barat berdiri pada tahun 1973. Dan adapun susunan pimpinan atau kepala badan pendapatan daerah sejak berdirinya hingga sekarang yaitu sebagai berikut:

- a) Pada tahun 1973 s/d 1976 Dispenda dipimpin oleh A. Abd. Majid M,BA
- b) Tahun 1976 s/d 1980 Dispenda dipimpin oleh Muhiddin Wahab B, BA
- c) Tahun 1980 s/d 1983 Dispenda dipimpin oleh Muh. Ali
- d) Tahun 1983 s/d 1986 Dispenda disebut Mapenda (Manual Pendapatan Asli Daerah)
- e) Tahun 1986 s/d 1989 Mapenda dipimpin oleh Drs. Rasyid Azis
- f) Tahun 1989 s/d 1991 Mapenda diubah menjadi Kantor Dispenda yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Drs. Muh. Akib.
- g) Tahun 1991 s/d 1994 Dispenda dipimpin oleh Drs. A. Mappirewa Kasim

- h) Tahun 1994 s/d 1998 Dispenda dipimpin oleh M. Jabir Sanusi, Ba
- i) Tahun 1989 s/d 2003 Dispenda dipimpin oleh Drs. Syamsul Qamar AR, M.Si
- j) Tahun 2003 s/d 2005 Dispenda dipimpin oleh Syamsul Rijal Amir, S.Sos
- k) Tahun 2005 s/d 2006 Dispenda dipimpin oleh H. Sabirin Yahya, S.sos
- l) Tahun 2006 s/d 2013 Dispenda dipimpin oleh Drs. Lukman H. Aرسال, M.Si
- m) Tahun 2013 Dispenda dipimpin oleh Lukman Mannan, S.Ip., M.Si
- n) Tahun 2013 s/d 2017 Dispenda dipimpin oleh Drs. AKBAR, M.Si
- o) Tahun 2016 Dispenda diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
- p) Tahun 2017 s/d 2019 Dispenda dipimpin oleh Lukman Fattah, SE, MM
- q) Tahun 2019 Sampai sekarang Bapenda dipimpin oleh Asdar Amal Dharmawan, SH. MH

2. Tujuan Bapenda

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah.

- b) Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif guna memperoleh kinerja pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- c) Meningkatnya koorBadani dan hubungan kerja antar instansi dan unit kerja pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial masyarakat.
- d) Meningkatnya upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang potensial.
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
- f) Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- g) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional.
- h) Meningkatnya sistem administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah.

3. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai

a. Visi

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab”.

b. Misi

1. Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah.

2. Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
3. Peningkatan koorBadani dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaanserta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah

4. Struktur Organisasi Bada Pendapatan Daerah (BAPENDA)



B. FUNGSI DAN TUGAS ORGANISASI

1. Kepala Badan

Kepala badan pendapatan daerah mempunyai fungsi membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Kepala badan pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan, administrasi pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah, serta tugas kesekretariatan.
- c) Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan tugas. satuan kerja perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah.
- d) Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pendapatan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkup badan. Adapun fungsi sekretaris yang harus diselenggarakan yaitu:

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Program

Sub bidang program mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja. Dimana fungsi dan tugas sub bidang yang harus diselenggarakan yaitu:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program
- c) Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan
- d) Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan

- e) Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Badan
- f) Menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan kinerja tahunan, dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Sub Bidang Keuangan

Sub bidang keuangan mempunyai tugas dan fungsi membantu sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan. Adapun fungsi dan tugas yang harus di selenggarakan antara lain:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan
- c) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar
- d) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan

- e) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan
- f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian

Dimana sub bidang umum mempunyai fungsi dan tugas membantu sekretaris dalam mengurus rumah tangga serta mengelolah administrasi kepegawaian dan fasilitas rancangan produk hukum di lingkungan badan.

Adapun fungsi dan tugas yang arus di diselenggarakan antara lain yaitu:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan
- d) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum
- e) Melaksanakan tugas keprotokoleran

- f) Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya
 - g) Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan
 - h) Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan
 - i) Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan
 - j) Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Badan
 - k) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
6. Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Membantu kepalabidang penetapan dan pelayanan PBB-P2 dalam merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang pelayanan PBB-P2. Adapun fungsi dan tugas yang harus direalisasikan yaitu antara lain:
- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c) Melakukan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak tertagih diakhir tahun pajak
- d) Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding wajib pajak sesuai batas kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
- e) Mencocokkan Daftar Setoran Harian dengan potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang akan disetorkan oleh Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- f) Melakukan rekonsiliasi hasil penyetoran Koordinator Kolektor, Kolektor dan/atau Wajib berdasarkan Daftar Setoran Harian dan/atau potongan Surat Pemberitahuan Pajak terutang dengan Sub Bidang Data dan Informasi.
- g) Menginventarisir permasalahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan laporan dari Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
- h) Memberikan bimbingan teknis kepada Koordinator kolektor, kolektor dan/ atau wajib tentang mekanisme dan system penyetoran, mutasi dan keberatan atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- i) Melakukan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pada Koordinator kolektor, kolektor dan/atau wajib pajak
- j) Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

Membantu kepala bidang penetapan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang penilaian dan penetapan. Dimana adapun fungsi dan tugas yang harus diselenggarakan antara lain:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang penilaian dan penetapan
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
- c) Menyusun draft Surat Keputusan Kepala Badan akibat perubahan data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak akibat mutasi, pembatalan ketetapan dan penerbitan Objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- d) Menyusun rencana target penerimaan pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahun Anggaran

- e) Melakukan penilaian dan penetapan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara massal, individu dan/atau jabatan
- f) Melakukan penilaian dan penetapan atas usulan mutasi dan penerbitan objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- g) Memproses pengajuan keberatan dan banding wajib pajak
- h) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penetapan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya
- i) Menyiapkan bahan pelaksanaan keputusan menrima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding
- j) Melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan wajib retribusi serta pemberian sanksi (denda) sesuai ketentuan yang berlaku
- k) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan sub bidang penilaian dan penetapan; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

8. Sub Bidang Data dan Informasi

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi. Adapun fungsi dan tugas yang harus diselenggarakan yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Data dan Informasi
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi
- c) Mengerjakan usulan mutasi, pembatalan ketetapan, penerbitan baru objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan yang diterima dari Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- d) Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data system Informasi Manajemen Objek Pajak
- e) Melakukan pencetakan surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara massal
- f) Menerbitkan surat tagih pajak daerah, surat tagih pajak daerah kurang bayar, surat tagih pajak daerah kurang bayar tambahan, surat teguran, dan surat paksa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- g) Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang, surat tagih pajak daerah, surat tagih pajak daerah kurang bayar, surat tagih pajak daerah kurang bayar tambahan, surat teguran dan surat paksa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- h) Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tidak tertagih diakhir tahun pajak

- i) Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak
- j) Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang kadaluarsa penagihan
- k) Melakukan monitoring terhadap kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh kolektor
- l) Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- m) Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sub bidang data dan informasi
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

9. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Adapun fungsi dan tugas dari bidang penerimaan dan pengelolaan pajak daerah adalah melaksanakan sebagian tugas badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan serta pelaporannya. Adapun tugas dan fungsi yang harus diselenggarakan antarlain:

- a) Perumusan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.

- b) Pelaksanakan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.
- c) Pelaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah.
- d) Pelaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas.
- e) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

10. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

Mempunyai fungsi dan tugas yaitu membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bagi Hasil Pajak. Adapun fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak.
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bagi Hasil Pajak.
- c) Menyusun rencana penerimaan bagi hasil pajak.
- d) Melakukan pendataan potensi pajak pusat dan pajak provinsi yang dibagihasikan kepada Kabupaten.

- e) Melakukan kerjasama dengan instansi/unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dalam upaya meningkatkan penerimaan bagi hasil bukan pajak.
- f) Melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- g) Menyusun rencana penerimaan bagi hasil setiap tahun sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- h) Melakukan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebagai bahan laporan
- i) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

11. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Mempunyai fungsi dan tugas yaitu membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bagi Hasil Pajak. Adapun fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

- c) Menyusun dan/atau menghimpun data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
- d) Melakukan pemutakhiran basis data potensi pajak daerah secara berkala
- e) Mencari, menghimpun dan mengolah data objek pajak daerah
- f) Melakukan perhitungan jumlah jumlah angsuran wajib pajak yang telah di tetapkan
- g) Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah
- h) Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada kolektor dan wajib pajak daerah
- i) Melakukan perhitungan serta penetapan pengenaan pajak daerah secara jabatan dan/atau berdasarkan laporan/ penyampaian dari wajib pajak
- j) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan serta Surat Teguran Pajak Daerah, serta system pembayaran/ angsurannya
- k) Melakukan penomoran terhadap Wajib Pajak Daerah
- l) Mensosialisasikan produk peraturan daerah maupun produk hokum daerah lainnya mengenai pajak daerah kepada masyarakat
- m) Menginventarisir permasalahan Pajak daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya

- n) Memfasilitasi pengajuan keberatan dan banding di bidang pajak daerah sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o) Menyusun bahan pelaksanaan keputusan menerima atau menolak keberatan serta menyiapkan penyelesaian permohonan banding
- p) Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan daftar cadangan usulan penghapusan piutang setiap tahun
- q) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

12. Sub Bidang Penagihan Pajak

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi, adapun fungsi dan tugas yang harus direalisasikan yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penagihan Pajak;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan Pajak;
- c) Mendistribusikan Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak Daerah, Surat Tagih Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Tagih Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan serta Surat Teguran Pajak Daerah kepada Kolektor;

- d) Menginventarisir dan menyusun daftar tunggakan Pajak Daerah yang tidak tertagih di akhir tahun Pajak;
- e) Menyusun daftar usulan penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang di akhir tahun pajak;
- f) Menyusun draft Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Daerah yang kadaluarsa penagihan;
- g) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kolektor pajak daerah;
- h) Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah;
- i) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penagihan dan penyetoran termasuk tunggakan Wajib Pajak serta pemberian sanksi sesuai ketentuan berlaku;
- j) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
- k) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

13. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan. Adapaun fungsi dan tugas yang harus direalisasikan antara lain:

- a) Perumusan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
- c) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

14. Sub Bidang Potensi Pendapatan

Membantu Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Potensi Pendapatan. Adapun tugas fungsi yang harus direalisasikan antara lain:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Potensi Pendapatan Daerah
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Potensi Pendapatan
- c) Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah dan retribusi serta pendapatan daerah lainnya sebagai dasar perencanaan penerimaan pendapatan daerah

- d) Melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala dalam rangka penyusunan potensi pendapatan
- e) Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- f) Menyusun data potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- g) Melakukan kerjasama dengan akademisi dalam rangka pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah
- h) Melakukan perhitungan secara berkala potensi pendapatan daerah dan retribusi daerah
- i) Melakukan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Potensi Pendapatan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

15. Sub Pengendalian Pendapatan Daerah

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Adapun fungsi dan tugas yang harus direalisasikan antara lain yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Pendapatan
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Pendapatan

- c) Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal pengendalian serta pelaksanaan penertiban pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- d) Melakukan bimbingan teknis kepada perangkat daerah dan/unit pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Melakukan pengkajian dan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta solusi pemecahannya
- f) Melakukan penyelesaian terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah/ unit pengelola pajak daerah dan retribusi daerah
- g) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi berkaitan dengan pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- h) Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/ Instansi/ Unit Kerja lain Retribusi Daerah
- i) Melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan dan penertiban
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu, menggunakan laporan keuangan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sinjai 2019-2023, yang diperoleh langsung dari badan pendapatan daerah.

Terdapat satu variabel independen dalam penelitian ini, yakni pajak bumi dan bangunan (X) serta satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 4.1
Deskripsi Data Penelitian

Tahun	PBB (X)	PAD(Y)
2019	28,34	557,11
2020	25,14	518,99
2021	31,22	621,8
2022	33,56	685,22
2023	15,96	319,23

Dari data di atas, terlihat bahwa ada variasi pada kedua variabel setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan baik pada PBB maupun PAD dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan data tahun 2023 hanya sampai pada bulan juni. Sebaliknya, pada tahun 2022, nilai tertinggi untuk kedua variabel tercatat dalam periode yang diteliti.

2. Uji Normalitas

Ghozali dan Lincoln (2018) menjelaskan bahwa uji normalitas merupakan salah satu asumsi penting dalam SEM. Data yang tidak berdistribusi normal dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak valid.

Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			5
Normal Parameters(a,b)	Mean		,0000000
	Std. Deviation		11,02517015
Most Extreme Differences	Absolute		,192
	Positive		,144
	Negative		-,192
Kolmogorov-Smirnov Z			,430
Asymp. Sig. (2-tailed)			,993

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.sig) signifikan adalah sebesar 0,993 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan apabila probabilitas > dari 0,05 maka H0 akan diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai berdistribusi Normal.

3. Uji Korelasi Pearson Product Moment

Menurut Sugiyono (2017) Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2017) Koefisien korelasi product moment merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk

mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama.

Tabel 4.3

Correlations

		PBB	PAD
PBB	Pearson Correlation	1	,997(**)
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	5	5
PAD	Pearson Correlation	,997(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	5	5

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi product moment sebesar 0,997. Menurut Sugiyono (2019) nilai korelasi product moment sebesar 0,997 termasuk ke dalam kategori sangat kuat, yang artinya pajak bumi dan bangunan dengan PAD berada pada kategori sangat kuat dan menunjukkan korelasi hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut.

4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2017) Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2), koefisien ini disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependent dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independent.

Tabel 4.4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997(a)	,994	,992	12,731

a Predictors: (Constant), PBB
(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menggunakan SPSS versi 15,0 dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah 0,994 atau sama dengan 99,4% yang ditunjukkan oleh R square (angka korelasi yang dikuadratkan), artinya bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yaitu 99,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

5. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Pada analisis regresi suatu variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas atau independen variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. dari regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait.

Tabel 4.5
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,179	25,576		-,085	,937
	PBB	20,215	,929	,997	21,764	,000

a. Dependent Variable: PAD
(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

Secara umum rumus persamaan regresi linier sederhana adalah

$$Y = a + bX$$

Dari hasil uji analisis diatas diketahui nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwapajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatanasli daerah (PAD) Dari tabel di atas pada kolom B nilai constant (a) sebesar -2,179, sedangkan nilai pajak bumi dan bangunan (b) adalah 20,215 sehingga regresi dapat ditulis

$$Y = -2,179 + 20,215 X$$

6. Uji Statistik Parametrik

a. Uji Parsial (uji t)

Uji parsial merupakan uji yang dapat diukur secara individual untuk mengetahui hubungan setiap faktor bebas terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2005). Uji t digunakan untuk mengtes hubungan variabel otonom terhadap variabel dependen. uji ini diselesaikan dengan membandingkan kualitas pada tabel T. Dengan asumsi T tabel > T hitung dengan kepentingan dibawah 0,05% (5%). Jadi

sampai taraf tertentu, faktor bebas sama sekali penghasilan variabel bergantung, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.6

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,179	25,576		-,085	,937
	PBB	20,215	,929	,997	21,764	,000

a. Dependent Variable: PAD

(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara PBB dan PAD secara statistik signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t PBB yang lebih besar dari 1,96 (nilai t kritis pada tingkat signifikansi 5%). Setiap kenaikan Rp1 dalam PBB diperkirakan akan meningkatkan PAD sebesar Rp0,929. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PBB yang positif. Hubungan antara PBB dan PAD cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi terstandarisasi PBB yang mendekati 1. Dimana Uji t menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PBB dan PAD. Setiap kenaikan Rp1 dalam PBB diperkirakan akan meningkatkan PAD sebesar Rp0,929. Hubungan antara PBB dan PAD cukup kuat.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan tren yang positif, terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya. Begitu juga halnya dengan penerimaan daerah Kabupaten Sinjai yang bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan, yang

juaga menunjukkan tren positif, walaupun tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan, dimana kondisi ini disebabkan karena pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi hampir disemua bidang. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023. Sehingga hipotesis diterima (H1).

Adapun Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bachri & M. Halim (2011) dengan judul "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Palopo". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan lebih ditingkatkan terutama dari sistem penagihan yang diperketat maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu faktor terbesarnya dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB V

KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan tren yang positif, terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya. Begitu juga halnya dengan penerimaan daerah Kabupaten Sinjai yang bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan, yang juga menunjukkan tren positif, walaupun tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan, dimana kondisi ini disebabkan karena pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi hampir disemua bidang. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023.

b. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, terdapat beberapa kelemahan dan saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sumber atau data yang berbeda.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan data yang berbeda atau memperluas objek penelitian bukan hanya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.
3. Hendaknya kerjasama antara petugas pajak, aparat desa dan masyarakat sebagai wajib pajak lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan rekapitulasi data agar tidak terjadi kesalahan pada pemberian Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh petugas pajak dan diharapkan tepat waktu menyalurkan SPPT kepada wajib pajak, agar masyarakat tidak terlambat membayar pajak, karena hal tersebut juga menjadi faktor penghambat rendahnya tingkat penerimaan pajak dari masyarakat. Pembayaran pajak oleh masyarakat harus dapat digunakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W., dan Adhianto, D. (2021). Dampak Penilaian Tanah dan Rumah serta Bea Pengerangan Jalan Terhadap Gaji Unik Bagian Sumedang Periode 2016-2020. *MEA Logical Diary (Eksekutif, Aspek Keuangan dan Pembukuan*, 5 (2), 1723-1741.
- Blki, R., dan Udaili, L. (2020). Dampak Biaya Penginapan, Bea Restoran, dan Penilaian Hiburan terhadap Keunikan Gaji Teritorial Bagian Bone Bolango. *Buku Harian Pembukuan (JA)*, 7 (2), 116-130.
- Esse Irham, T., Bachri, S., dan Halim, M. (2011). Dampak Biaya Tanah dan Rumah terhadap Keunikan Lokal Pay Wilayah Palopo. *Buku Harian Keseimbangan*, 1 (1), 61-67.
- Enga (2019). Penelitian Pembagian Tugas Pertanahan dan Rumah Negara dan Sipil di Wilayah Malayang. *Buku Harian Penelitian Pembukuan* 14 (3).
- Erlina, 2018. Pendekatan Penelitian Bisnis: Untuk Pembukuan dan Penpengajaran, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Firmansyah, H., dan Nurdiana, H. (2022). Kelayakan Ragam Penilaian Tanah dan Rumah dalam Perluasan Keunikan Kewilayahan (Bantalan) di Wilayah Padamukti Periode 2018-2020. *Buku Harian Administrasi Terapan dan Uang (Mankeu)*, 11 (03), 576-588.
- Hasugian, MJ ((2018). Dampak Citizen Mindfulness dan Expense Assent terhadap Konsistensi Individu Warga Negara pada Kantor Administrasi Tugas Pratama Sibolga. *Proposal, Tenaga Kerja Aspek Keuangan dan Bisnis, Perpengajaran Banyak Wilayah Medan*, 69.
- Hidayani, S., dan Lubis, AW (2023). Faktor-Faktor yang Penghasilan Keuntungan Warga dalam Melunasi Luas dan Biaya Rumah (PBB) di Wilayah Banyumas, Wilayah Stabat, Bagian Langkat. *VISA: Buku Harian Mimpi dan Pikiran*, 3 (2), 260.
- Indah Lestari, A., dan Hutami Wulandari, S. (2022). Dampak Penghasilan dan Komitmen 1 Penilaian Tanah dan Rumah terhadap Keunikan Kewilayahan Wilayah Makassar. *YUME : Buku Harian Dewan*, 5 (1), 46-51. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456>.
- Jauhari, I., Rivandi, M., Banyak, S., dan Kbp, IE (2022). Dampak Penilaian Tanah dan Rumah (PBB) dan Hak Istimewa Perolehan Biaya Tanah dan Rumah (BPHTB) di 19 Wilayah Wilayah dan Bagian Wilayah Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Buku Harian Peneliti Pembukuan*, 3 (1), 33-45.
- Juwita, R., Mulyanti, K., dan Ainur Rahmaan, F. (2022). Dampak Penilaian Tanah dan Rumah terhadap Keunikan Gaji Wilayah (Bantalan) pada Pemerintahan Bagian

- Ciamis Periode 2018-2020. JAMER: Buku Harian Otonom Ilmu Pembukuan, 3 (1), 28-36.
- Juwita, R., Mulyanti, K., dan Ainur Rahman, F. (2022). Dampak Pengeluaran Tanah dan Rumah terhadap Keunikan Pembayaran Wilayah (Bantalan) pada Pemerintah Wilayah Bagian Ciamis Periode 2018-2020. JAMER: Buku Harian Otonom Ilmu Pembukuan, 3 (1), 28-36.
- Leser dan Rahmat (2014). Penelitian Penghasilan Bea Tanah dan Rumah (PBB) di Dua Wilayah di Wilayah Tirtayasa Bagian Serang. Buku harian pembukuan. Jil. 1, Urutan1, Halaman: 50-60.
- Lubis, putri kecil Kemala Dewi. (2018). Penelitian Penilaian Penghasilan Tanah dan Rumah pada JAKPI Administrasi Penghasilan Wilayah Wilayah Medan, Vol. 6, tidak. 1.
- Ma'ruf, H., dan Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Penghasilan Konsistensi Warga Dalam Melunasi Luas dan Biaya Rumah. Buku Harian Pembukuan dan Pemungutan Retribusi, 20 (2), 276-284.
- Nur Madina, A., Aris Safi, M., dan Tubagus Surur, A. (2022). Dampak Penerimaan Bea Tanah dan Rumah Terhadap Gaji Wilayah Unik Bagian Pekalongan Periode 2016-2020. Buku Harian Sahmiyya, 1 (2), 25-32.
- Rufaidah, F., dan Dais Muharom, A. (2022). Dampak Penghasilan Belanja Tanah dan Rumah Terhadap Gaji Lokal Unik Wilayah Bandung. Buku Harian Uang, 3 (1), 24-34.
- Sista, NPA (2019). Dampak Perhatian Warga Negara, Kualitas Administrasi Pengeluaran, Komitmen Etis, dan Persetujuan Tugas terhadap Konsistensi Warga Negara. Buku Harian Sains, Pembukuan dan Dewan, 1(1).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Sugiyourutan (2005). Strategi Penelitian Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan Pengembangan. Distribusi Alfabet; Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Trisna. (2022). Dampak Penilaian Tanah dan Rumah terhadap Keunikan Kewilayahan Bagian Tolitoli Periode 2015-2020. Buku Harian Multidisiplin Madani , 2 (5), 2229-2 246. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.326>.
- Peraturan Urutan 28 Periode 2009 tentang Retribusi Wilayah dan Tol Provinsi.
- Wibisono, T., dan Sri Mulyani, Y. (2019). Penilaian Kelayakan Tanah dan Rumah Negara dan Metropolitan pada Pembayaran Lokal (Bantalan) Unik di Peraturan

Tasikmalaya. Buku Harian *Ecodomica*, 3 (2), 133-140.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>.

Wulandari, Sri Widiawati, H., dan Sugeng. (2023). Dampak PBB, Penilaian Penginapan dan Pengeluaran Restoran terhadap Gaji Provinsi Khusus Bagian Nganjuk 2020-2022. *Kursus Umum Administrasi, Keuangan dan Pembukuan*, 617-625. 1.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Tabel Daftar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sinjai 2019-2023

Tahun	Target PBB (Rp Miliar)	Realisasi PBB (Rp Miliar)	Persentase Pencapaian (%)
2019	27,12	28,34	104,53%
2020	28,5	25,14	88,21%
2021	30	31,22	104,07%
2022	32	33,56	104,88%
2023	17	15,96	93,94%

Lampiran 2 Deskripsi Data Penelitian

Tahun	PBB (X)	PAD(Y)
2019	28,34	557,11
2020	25,14	518,99
2021	31,22	621,8
2022	33,56	685,22
2023	15,96	319,23

Lampiran 3 Output Hasil Penelitian Menggunakan SPSS)

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11,02517015
Most Extreme Differences	Absolute	,192
	Positive	,144
	Negative	-,192
Kolmogorov-Smirnov Z		,430
Asymp. Sig. (2-tailed)		,993

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

2. Hasil Uji Korelasi Pearson Product Moment

Correlations

		PBB	PAD
PBB	Pearson Correlation	1	,997(**)
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	5	5
PAD	Pearson Correlation	,997(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	5	5

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Pengolahan Data SPSS 15.0)

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997(a)	,994	,992	12,731

a Predictors: (Constant), PBB

4. Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,179	25,576		-,085	,937
	PBB	20,215	,929	,997	21,764	,000

a. Dependent Variable: PAD

5. Hasil Uji Statistik Parametrik

Uji t

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,179	25,576		-,085	,937
	PBB	20,215	,929	,997	21,764	,000

a. Dependent Variable: PAD

KECAMATAN DESAKELURAHAN	POKOK KETETAPAN		JUMLAH REALISASI TUNGGAKAN 2014 - 2020		JUMLAH REALISASI TAHUN 2021		JUMLAH REALISASI		%	SISA		KET.
	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG		JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	
III. BULUPODDO												
1. LAMATTI RIJAJA	3.398	Rp 52.618.918	3	Rp 812.380	3.398	Rp 52.618.919	3.399	Rp 53.431.299	100,00%	-	Rp -	LUNAS
2. LAMATTI RIATTANG	3.453	Rp 52.384.905	1	Rp 8.256	3.453	Rp 52.384.905	3.454	Rp 52.393.161	100,00%	-	Rp -	LUNAS
3. DUAMPANJAE	2.698	Rp 54.094.034	-	Rp -	2.698	Rp 54.094.034	2.698	Rp 54.094.034	100,00%	-	Rp -	LUNAS
4. LAMATTI RIAWANG	3.825	Rp 45.210.478	-	Rp -	3.825	Rp 45.210.478	3.825	Rp 45.210.478	100,00%	-	Rp -	LUNAS
5. BULU TELLUHE	5.198	Rp 80.464.422	-	Rp -	5.198	Rp 80.464.422	5.198	Rp 80.464.422	100,00%	-	Rp -	LUNAS
6. TOMPOBULU	1.892	Rp 28.090.087	1	Rp 6.160	1.892	Rp 28.090.087	1.893	Rp 28.096.247	100,00%	-	Rp -	LUNAS
7. LAPPA ONRAHA	1.784	Rp 27.500.292	-	Rp -	1.784	Rp 27.500.292	1.784	Rp 27.500.292	100,00%	-	Rp -	LUNAS
JUMLAH	22.246	Rp 340.363.137	5	Rp 826.796	22.246	Rp 340.363.137	22.251	Rp 341.189.933	100,00%	-	Rp -	
IV. SINJAI BORONG												
1. PASIR PUTHI	2.281	Rp 34.820.809	108	Rp 2.681.325	2.243	Rp 34.097.290	2.351	Rp 36.778.615	97,52%	38	Rp 723.519	
2. BATU BELERANG	2.325	Rp 32.657.252	2	Rp 123.117	2.325	Rp 32.657.252	2.327	Rp 32.790.369	100,00%	-	Rp -	LUNAS
3. BIJI NANGKA	3.176	Rp 44.461.751	1	Rp 83.421	3.176	Rp 44.461.751	3.177	Rp 44.525.172	100,00%	-	Rp -	LUNAS
4. BARAMBANG	2.554	Rp 38.855.863	121	Rp 1.880.301	2.554	Rp 38.855.863	2.675	Rp 40.742.164	100,00%	-	Rp -	LUNAS
5. KASSI BULENG	2.830	Rp 39.875.798	578	Rp 7.521.160	2.830	Rp 39.875.798	3.408	Rp 47.396.958	100,00%	-	Rp -	LUNAS
6. BONTO SINJALA	1.729	Rp 28.126.501	-	Rp -	1.729	Rp 28.126.501	1.729	Rp 28.126.501	100,00%	-	Rp -	LUNAS
7. BONTO KATUTE	2.488	Rp 39.271.991	7	Rp 60.296	2.159	Rp 33.929.392	2.166	Rp 33.969.688	86,40%	329	Rp 5.342.599	
8. BONTO TENGGAGA	1.909	Rp 26.146.122	20	Rp 278.484	1.909	Rp 26.146.122	1.929	Rp 26.424.606	100,00%	-	Rp -	LUNAS
JUMLAH	19.292	Rp 294.216.687	837	Rp 12.614.104	18.925	Rp 278.149.969	19.762	Rp 290.764.073	97,87%	367	Rp 8.066.118	
JUMLAH TOTAL	241.790	Rp 5.141.576.533	4.708	Rp 136.573.340	234.794	Rp 4.985.170.042	239.502	Rp 5.041.743.382	95,40%	6.996	Rp 236.406.491	

Sinjai, 03 Januari 2022
 Kepala Bidang Pendapatan Daerah
 Kabupaten Sinjai
WASDAR MAH DHARMAWAN, SH., MH.
 Paripikil Pembina Utama Muda
 NIP. 19781114 200804 1 001

Page 3

KECAMATAN DESAKELURAHAN	POKOK KETETAPAN		JUMLAH REALISASI TUNGGAKAN 2014 - 2020		JUMLAH REALISASI TAHUN 2021		JUMLAH REALISASI		%	SISA		KET.
	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG		JML SPPT	NILAI PBB TERHUTANG	
III. BULUPODDO												
1. LAMATTI RIJAJA	3.398	Rp 52.618.918	3	Rp 812.380	3.398	Rp 52.618.919	3.399	Rp 53.431.299	100,00%	-	Rp -	LUNAS
2. LAMATTI RIATTANG	3.453	Rp 52.384.905	1	Rp 8.256	3.453	Rp 52.384.905	3.454	Rp 52.393.161	100,00%	-	Rp -	LUNAS
3. DUAMPANJAE	2.698	Rp 54.094.034	-	Rp -	2.698	Rp 54.094.034	2.698	Rp 54.094.034	100,00%	-	Rp -	LUNAS
4. LAMATTI RIAWANG	3.825	Rp 45.210.478	-	Rp -	3.825	Rp 45.210.478	3.825	Rp 45.210.478	100,00%	-	Rp -	LUNAS
5. BULU TELLUHE	5.198	Rp 80.464.422	-	Rp -	5.198	Rp 80.464.422	5.198	Rp 80.464.422	100,00%	-	Rp -	LUNAS
6. TOMPOBULU	1.892	Rp 28.090.087	1	Rp 6.160	1.892	Rp 28.090.087	1.893	Rp 28.096.247	100,00%	-	Rp -	LUNAS
7. LAPPA ONRAHA	1.784	Rp 27.500.292	-	Rp -	1.784	Rp 27.500.292	1.784	Rp 27.500.292	100,00%	-	Rp -	LUNAS
JUMLAH	22.246	Rp 340.363.137	5	Rp 826.796	22.246	Rp 340.363.137	22.251	Rp 341.189.933	100,00%	-	Rp -	
IV. SINJAI BORONG												
1. PASIR PUTHI	2.281	Rp 34.820.809	108	Rp 2.681.325	2.243	Rp 34.097.290	2.351	Rp 36.778.615	97,52%	38	Rp 723.519	
2. BATU BELERANG	2.325	Rp 32.657.252	2	Rp 123.117	2.325	Rp 32.657.252	2.327	Rp 32.790.369	100,00%	-	Rp -	LUNAS
3. BIJI NANGKA	3.176	Rp 44.461.751	1	Rp 83.421	3.176	Rp 44.461.751	3.177	Rp 44.525.172	100,00%	-	Rp -	LUNAS
4. BARAMBANG	2.554	Rp 38.855.863	121	Rp 1.880.301	2.554	Rp 38.855.863	2.675	Rp 40.742.164	100,00%	-	Rp -	LUNAS
5. KASSI BULENG	2.830	Rp 39.875.798	578	Rp 7.521.160	2.830	Rp 39.875.798	3.408	Rp 47.396.958	100,00%	-	Rp -	LUNAS
6. BONTO SINJALA	1.729	Rp 28.126.501	-	Rp -	1.729	Rp 28.126.501	1.729	Rp 28.126.501	100,00%	-	Rp -	LUNAS
7. BONTO KATUTE	2.488	Rp 39.271.991	7	Rp 60.296	2.159	Rp 33.929.392	2.166	Rp 33.969.688	86,40%	329	Rp 5.342.599	
8. BONTO TENGGAGA	1.909	Rp 26.146.122	20	Rp 278.484	1.909	Rp 26.146.122	1.929	Rp 26.424.606	100,00%	-	Rp -	LUNAS
JUMLAH	19.292	Rp 294.216.687	837	Rp 12.614.104	18.925	Rp 278.149.969	19.762	Rp 290.764.073	97,87%	367	Rp 8.066.118	
JUMLAH TOTAL	241.790	Rp 5.141.576.533	4.708	Rp 136.573.340	234.794	Rp 4.985.170.042	239.502	Rp 5.041.743.382	95,40%	6.996	Rp 236.406.491	

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 271/05/A.2-II/IV/45/2024 Makassar, 3 April 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Arfanuddin

Stambuk : 105731106720

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di bapenda kabupaten sinjai

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 9717/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: Izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4032/05/C 4-VIII/IV/1445/2024 tanggal 03 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ARFANUDDIN
Nomor Pokok	: 105731106720
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAPENDA KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 April s.d 25 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peritriggal.

Nomor: 9717/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Arfanuddin
Nim : 105731106720
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



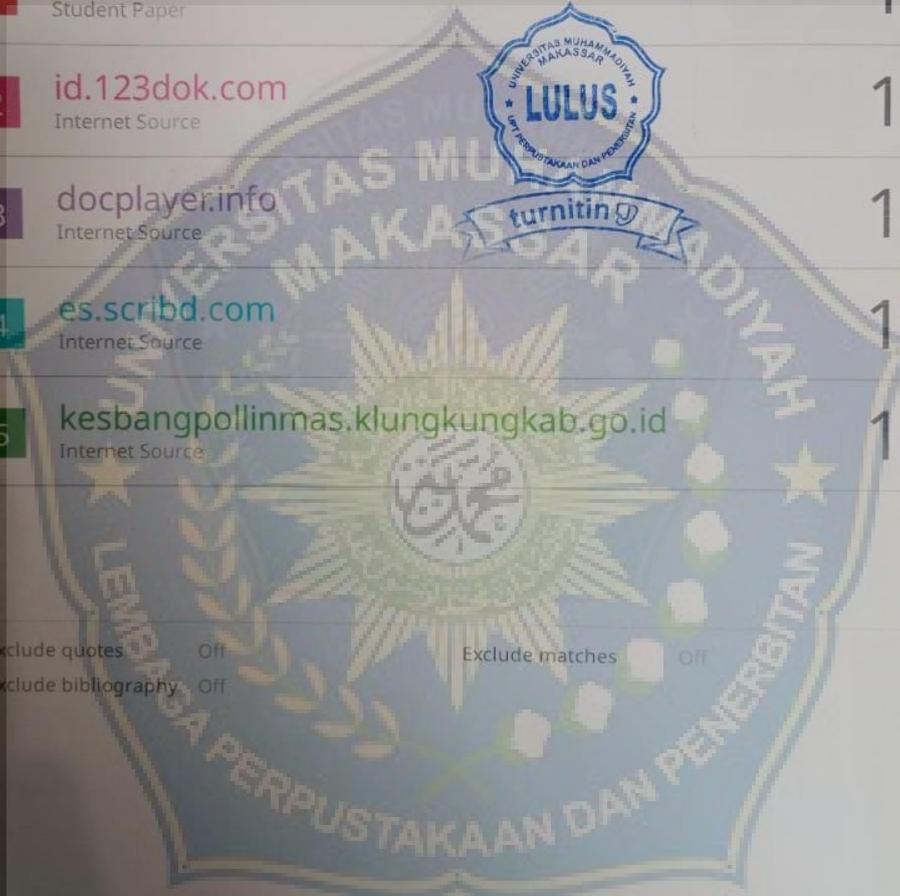
ANUDDIN 105731106720 Bab I

ORIGINALITY REPORT

6%	5%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
2	id.123dok.com Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	kesbangpollinmas.klungkungkab.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

ANUDDIN 105731106720 Bab II

ORIGINALITY REPORT

25%	24%	12%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	bimtekpbb.blogspot.com Internet Source	2%
5	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1%
8	www.jogloabang.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1%

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Christian University of Maranatha

Student Paper

3%

2

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

3%

3

Erizke Aulya Pasel, Yuhandri Yuhandri, Ghnadi Widi Nurcahyo Nurcahyo. "The Implementation of Artificial Neural Networks to measure the correlation of teacher's workload to the number of own learning media", Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 2023

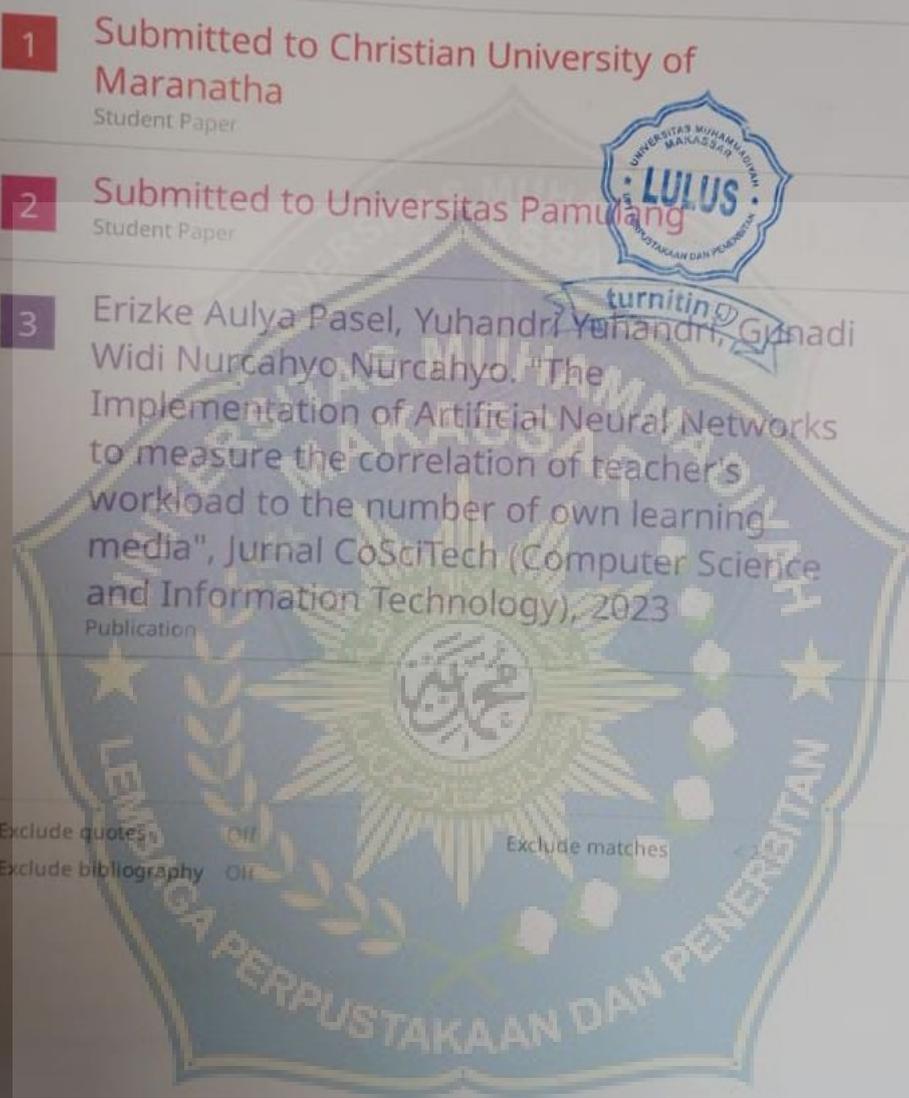
Publication

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



FANUDDIN 105731106720 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
2	jurnalmadani.org Internet Source	1%
3	scholarcommons.usf.edu Internet Source	<1%
4	www.tandfonline.com Internet Source	<1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
6	123dok.com Internet Source	<1%
7	id.scribd.com Internet Source	<1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

ADDIN 105731106720 Bab V

PLAGIARISM REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

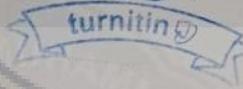
1

id.123dok.com

Internet Source



2%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BIOGRAFI PENULIS



Arfanuddin, panggilan arfa. Lahir di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada tanggal 02 februari 2002 dari pasangan suami istri bapak irianto dan ibu sukaena. Peneliti merupakan anak tunggal yang sekarang bertempat tinggal di hertasning. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu Paud lulus pada tahun 2008, SDN 145 Sinjai lulus pada tahun 2014, madrasa tsanawiyah lulus pada tahun 2017, SMAN 8 Sinjai lulus pada tahun 2020, dan pada tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masi terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2024 Penulis berhasil menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “ Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kabupaten Sinjai priode 2019-2023 “.

